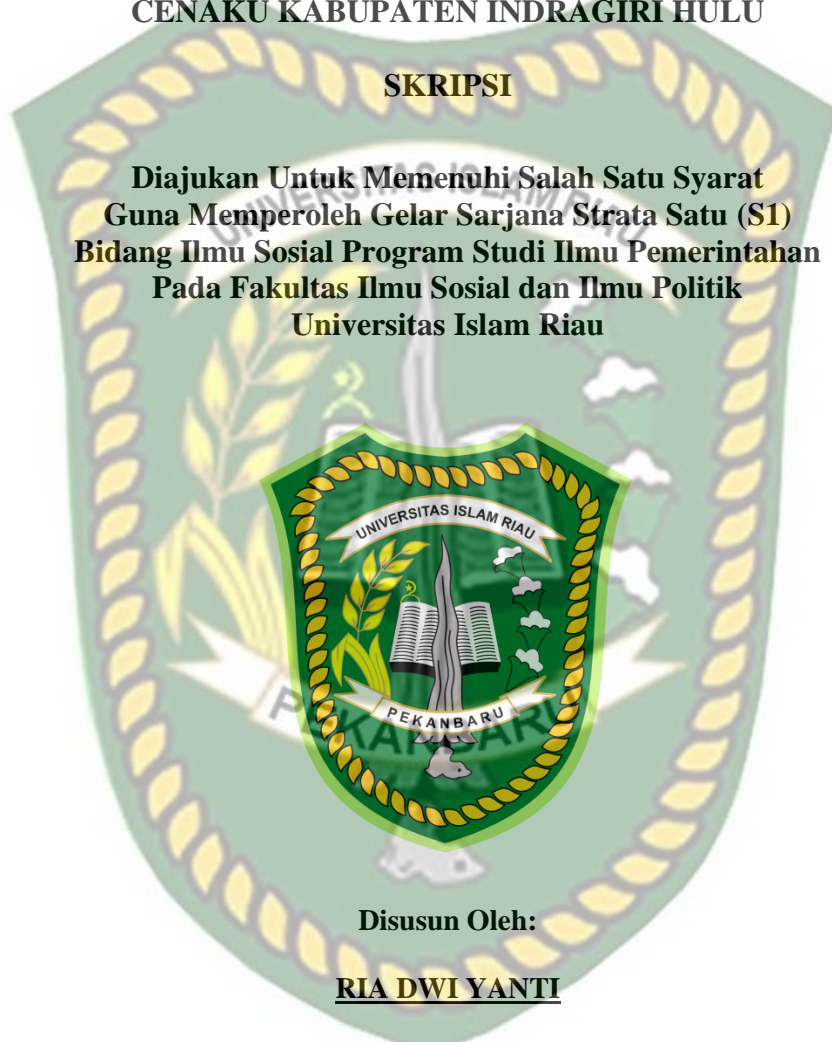


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-  
Dana Desa) DI DESA PEMATANG MANGGIS KECAMATAN BATANG  
CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**



**Disusun Oleh:**

**RIA DWI YANTI**

**NPM: 187310403**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ria Dwi Yanti  
NPM : 187310403  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  
(BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis  
Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, 19 April 2022

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian. S. IP., M.Si

Nina Yustaini, S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Ria Dwi Yanti  
NPM : 187310403  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Pekanbaru, 19 April 2022

Ketua, Sekretaris,  
  
Nina Yuslani, S.IP., M.Si  
  
Syaprianto, S.Sos, M.IP

Anggota  
  
Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I.  
  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

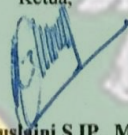


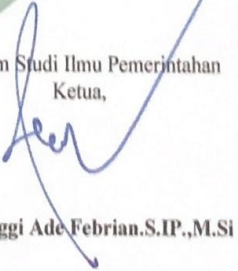
---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Ria Dwi Yanti  
NPM : 187310403  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini telah benar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 19 April 2022

Ketua,  <b>Nina Yustaini, S.IP., M.Si</b>	An. Tim Penguji Sekretaris/  <b>Syaprianto, S.Sos, M.IP</b>
Turut Menyetujui, Wakil Dekan I  <b>Indra Safri, S.Sos., M.Si</b>	Program Studi Ilmu Pemerintahan Ketua,  <b>Dr. Ranggi Ade Febrian.S.IP.,M.Si</b>

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T karena atas Rahmat dan Hidayah-NYA serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu".

Kemudian Shalawat beserta Salam saya hanturkan untuk junjungan alam baginda Nabi Muhammad S.A.W dengan mengucapkan Allahuma Solli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Sayyidina Muhammad Assalamu'alaika Ya Rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai berkahnya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Adapun judul Skripsi yang penulis angkat adalah "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu"

Naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak baik keluarga, para Dosen, maupun teman-

teman yang telah membaca skripsi penelitian ini. Dalam kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku rector Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah menyediakan fasilitas dan menyumbangkan pemikiran serta ilmu yang beliau miliki kepada penulis.
4. Bapak Andriyus S.Sos., M.Si selaku sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Ibu Nina Yuslaini, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan penelitian ini.

6. Para Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun diluar lingkungan kampus.
7. Bapak/Ibu kepala Tata Usaha beserta seluruh staf pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
8. Terkhusus ucapan terimakasih kepada kedua Orang Tua penulis. Ayahanda Suhud dan Ibunda Sulikah yang telah memberikan pendidikan kuliah kepada penulis hingga sampai pada tahap ini dan selalu memberikan Do'a serta dukungan yang tiada henti kepada penulis dalam kondisi apapun serta Kepada Adik dan Keluarga yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. kepada Rekan-Rekan seperjuangan terkhusus kepada sahabat-sahabat saya Food addict, Freeyey, SC, Eka Yofita, Farida Aulia Putri dan teman-teman kelas Ilmu Pemerintahan F angkatan 2018 dan orang-orang terdekat yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.
10. Dan seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberikan saran serta masukan kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis mendo'akan semoga seluruh jasa baik yang diberikan oleh yang disebutkan diatas dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. Akhir

kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi pembaca.

Pekanbaru, 19 April 2022

Penulis

**Ria Dwi Yanti**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Kegunaan Penelitian .....	17
<b>STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	19
A. Studi Kepustakaan .....	19
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	19
2. Konsep Pemerintahan .....	22
3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	24
4. Konsep Desa .....	29
5. BLT-Dana Desa .....	32
6. Dana Desa .....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	37
C. Kerangka Pikir .....	40
D. Konsep Operasional .....	41
E. Operasional Variabel.....	44
<b>BAB III</b> .....	47
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	47
A. Tipe Penelitian .....	47

B. Lokasi Penelitian.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	53
G. Lama Waktu Penelitian.....	55
<b>BAB IV.....</b>	<b>56</b>
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu.....	56
B. Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hulu.....	58
C. Kondisi Demografi.....	58
D. Visi Misi Kabupaten Indragiri Hulu.....	59
E. Struktur Pemerintah Desa Pematang Manggis.....	60
<b>BAB V.....</b>	<b>65</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Identitas Informan.....	65
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.....	68
C. Faktor Penghambat Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.....	85
<b>BAB VI.....</b>	<b>91</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. KESIMPULAN.....	91
B. SARAN.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

Table I.1 data penerima bantuan langsung tunai dana desa .....	7
Table II.1 Data keluarga mampu penerima BLT-Dana Desa .....	12
Table III.1 data masyarakat penerima bantuan ganda.....	14
Table IV.2 penelitian terdahulu .....	37
Table V.2 Operasional Variabel.....	45
Table VI.3 Informan penelitian.....	51
Table VII.3 Waktu penelitian .....	55
Table VIII.4 Usia Informan Penelitian .....	65
Table XI.4 Jenis Kelamin Penelitian.....	66
Table X.4 Tingkat Pendidikan Informan penelitian.....	67
Table XI.4 Nama dan Identitas Responden .....	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.2 kerangka pikir .....	41
Gambar II.4 Struktur Pemerintah Desa Pematang Manggis .....	64



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitan
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian Dilokasi Penelitian Mengenai Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu



**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Ria Dwi Yanti  
NPM : 1787310403  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  
(BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis  
Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 April 2022

Yang Menyatakan,



**Ria Dwi Yanti**

**IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-Dana Desa) DI DESA PEMATANG MANGGIS KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh

**RIA DWI YANTI  
187310403**

**ABSTRAK**

Pandemi covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut tidak terkecuali terhadap perekonomian Desa. Dalam upaya mempertahankan kesejahteraan masyarakat pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar disetiap desa yang dikenal dengan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk penanganan covid-19 dan BLT-Dana Desa. BLT-Dana Desa di Desa Pematang Manggis terindikasi kurangnya tepat sasaran dan adanya bantuan ganda yang diberikan kepada KPM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah BLT-Dana Desa di Desa Pematang Manggis tersalurkan secara tepat sasaran, serta ingin mengetahui bagaimana implementasi pendataan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa pematang Manggis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Edward III (dalam Subarsono 2005) mengatakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan sebuah implementasi kebijakan yaitu factor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. adapun hasil dari penelitian ini Bahwasanya Implementasi Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu masih belum terlaksana secara maksimal, karena dari hasil wawancara dengan aparat desa maupun dengan masyarakat bahwasanya keberhasilan implementasi kebijakan harus sesuai dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

**Kata Kunci: BLT-Dana Desa, Implementasi Kebijakan**

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND CASH DIRECT ASSISTANCE  
(VILLAGE FUND CASH DIRECT ASSISTANCE) IN PEMATANG  
MANGGIS VILLAGE, BATANG CENAKU DISTRICT, INDRAGIRI HULU  
REGENCY**

Oleh

**RIA DWI YANTI  
187310403**

**ABSTRACT**

*The COVID-19 pandemic has suppressed the economy from various angles, including the village economy. In an effort to maintain the welfare of the community, the government disburses very large funds in each village known as the Village Fund. Based on Minister of Finance Regulation No. 40/PMK.07/2020 concerning Amendments to Minister of Finance Regulation No. 205/PMK.07/2019 concerning Village Fund Management, that Village Funds can be used for handling COVID-19 and BLT-Village Funds. The BLT-Village Fund in Pematang Manggis Village indicated a lack of proper targeting and double assistance provided to KPM. The purpose of this study was to find out whether the BLT-Village Funds in Pematang Manggis Village were channeled correctly, and to find out how the implementation of data collection on the community receiving the Village Fund Direct Cash Assistance in Pematang Manggis Village. This study uses a qualitative descriptive research method. Edward III (in Subarsono 2005) said that there are 4 factors that influence the success or failure of a policy implementation, namely (1) communication, (2) resources, (3) disposition, (4) bureaucratic structure. As for the results of this study, that the implementation of Direct Cash Assistance-Village Funds (BLT-Village Funds) in Pematang Manggis Village, Batang Cenaku District, Indragiri Hulu Regency has not been implemented optimally, because from the results of interviews with village officials and with the community that the success of policy implementation must in accordance with the indicators of communication, resources, disposition, bureaucratic structure.*

**Keywords: BLT-Village Fund, Policy Implementation**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak Desember tahun 2019 sampai sekarang seluruh dunia mengalami masa keprihatinan dengan kemunculan wabah covid-19 yang kemudian menyebar keseluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Status wabah ini selanjutnya oleh WHO disebut sebagai pandemic yang penyebarannya lebih dari 37 negara terjangkit virus covid-19 atau dikenal dengan virus corona.

Corona virus disease 2019 (Covid-19) merupakan varian baru virus yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu sehingga dapat memicu kemiskinan masyarakat (Bakri La Suhu, et al 2017). Akibat dari adanya virus corona ini Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan dengan menerapkan status tanggap darurat seperti penerapan status sosial distancing, selain itu pemerintah Indonesia juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar selanjutnya disebut PSBB.

Kebijakan ini terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan PSBB ini dilakukan guna menekan penyebaran covid-19. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona untuk mencegah kemungkinan penyebaran meluas, apabila kebijakan tersebut dijalankan, maka sejumlah kegiatan yang melibatkan public dibatasi seperti perkantoran atau instansi diliburkan atau bekerja dari rumah (*work from home*), kegiatan keagamaan, kegiatan belajar mengajar, dan pembatasan transportasi umum.

Hal-hal tersebut dilakukan dari rumah dengan menggunakan media online. Dan terbukti bahwa kebijakan PSBB ini dapat mengurangi penyebaran covid-19 disuatu daerah. Dari kebijakan tersebut secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan peningkatan pengangguran, yang berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin dikarenakan mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dipaksa harus mengikuti kebijakan PSBB dimana seluruh kegiatan dibatasi. Selain berdampak pada kesehatan, pandemic covid-19 juga berdampak pada sosial dan ekonomi.

Pandemic covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut tidak terkecuali terhadap perekonomian Desa. Dalam mewujudkan Desa yang memiliki masyarakat sejahtera pemerintah pusat menggelontorkan dana yang sangat besar disetiap desa yang dikenal dengan Dana Desa. Menurut Hidayati (Binar Dwiyanto Pamungkas, et al 2020) mengatakan bahwa Dana Desa yang diberikan kepada Desa akan dikelola oleh pemerintah desa agar tujuan dari desa dapat tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dikatakan di dalamnya bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic corona virus disease 2019 (covid-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disebut BLT Dana Desa. BLT Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemic covid-19.

Dimana BLT-Dana Desa juga merupakan salah satu kebijakan yang diatur dalam peraturan menteri desa PDTT No.6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa PDTT No.11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Permen desa ini mengatur mengenai sasaran penerima BLT, mekanisme pendataan, metode perhitungan alokasi BLT dalam dana desa, dan jangka waktu serta besaran anggaran BLT-Dana Desa.

Dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19 perlu penekanan baik pemerintah pusat hingga pemerintah Desa, Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia.

Dalam kondisi seperti saat ini pemerintah Desa memiliki peran sangat penting dalam upaya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 25 bab 5 bagian ke satu, Pemerintah Desa terdiri atas pemerintah Desa yang meliputi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa pematang manggis merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Desa Pematang Manggis merupakan Desa dengan jumlah penduduk yang saat ini tercatat ada 1149 jiwa, dengan jumlah kartu keluarga (KK) 343 dengan berbagai jenis perekonomian seperti keluarga yang mampu dan kurang mampu. Saat ini Desa Pematang Manggis berstatus Desa Berkembang. Desa berkembang atau yang disebut sebagai Desa Madya adalah desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi pengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan dalam menanggulangi kemiskinan.

Menurut Asya'ri (Binar Dwiyanto Pamungkas, et al 2020) mengemukakan bahwa dengan adanya penyaluran Dana Desa ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, salah satu di dalam nya adalah Program Bantuan Langsung Tunai.

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan bantuan yang dilatarbelakangi oleh upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga sasaran (RTS) sebagai akibat adanya dampak pandemic yang berdampak pada

perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19. Masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Keluarga (NIK) jika tidak memiliki NIK maka menggunakan Surat Keterangan Domisili. Bersamaan dengan menerima bantuan masyarakat dengan Surat Keterangan Domisili difasilitasi dalam mendapatkan NIK.

Dalam hal ini juga diatur Peraturan Kepala Desa Pematang Manggis Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selanjutnya nilai BLT Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan, dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan di Desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh Desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Walikota, usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Penerima BLT-Dana Desa harus memenuhi Kriteria dimana keluarga penerima adalah keluarga miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (Bappenas, panduan pendataan BLT-DD 2020) Kriteria tersebut yaitu:

- Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja, dan bantuan Sembako pemerintah lainnya

- Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan)
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- Tim pendata BLT-Dana Desa harus benar benar memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-Dana Desa. Semakin banyak kriteria keluarga dan rentan yang dipenuhi semakin menjadi prioritas penerima BLT Dana Desa.

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19. Upaya-upaya tersebut kemudian dilanjutkan oleh struktur kekuasaan dibawahnya yaitu pemerintah kabupaten selanjutnya pemerintah Desa. Desa Pematang Manggis adalah salah satu Desa yang turut serta menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Banyak masyarakat Desa Pematang manggis yang tergolong masyarakat kurang mampu, dalam data keluarga kurang mampu yang tercatat di Desa Pematang Manggis yaitu 42 keluarga kurang mampu, dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nya kurang mampu ditambah dengan adanya pandemic covid-19 mengakibatkan banyak kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian, terlebih kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Terdapat 343 Kartu keluarga dan 74 keluarga diantaranya yang mendapat BLT-Dana Desa. BLT-Dana Desa yang diberikan kepada KPM dari bulan April-

Juni 2020 sebesar Rp.600.000, selanjutnya dibulan Juli-Desember 2020 sebesar Rp.300.000. begitupun pada tahun 2021 BLT-Dana Desa sebesar Rp.300.000

Berikut data Keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa:

**Table I.1 data penerima bantuan langsung tunai dana desa**

N O	KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA	RT	RW	NAMA
1	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	1	1	SUTIMAN DAMANIK
2	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	1	1	TUBIYO
3	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	1	1	SAPRIYAL
4	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	1	1	TOHA WAHYUDI
5	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	1	1	AHMAD CHOERUN
6	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	1	1	SARWONO
7	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	2	1	SUMARNI
8	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	2	1	SADAT
9	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	BUDIMAN
10	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	BUDIANTO
11	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	MASRUL AMIN
12	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	TRI HERMAWAN
13	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	DARSONO
14	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	TRINEM
15	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	YANTO
16	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	SUJARWANTO
17	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	SUHARDIYANTO

18	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	JOKO TRIANTO
19	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	PAIMAN PADMO WIYONO
20	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	JIMIN
21	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	4	2	SURIADI
22	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	4	2	ABDUL FAHMI
23	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	5	3	INDA YANTI
24	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	5	3	SUGITO
25	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	6	3	RIJAL
26	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	6	3	SETU
27	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	6	3	PARSIDYANTO
28	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	6	3	ANDIKA SAPUTRA
29	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	7	4	HARIAMIN
30	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	7	4	SUROYO
31	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	7	4	SUPRIYANTO
32	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	8	4	AGUS SUTRIYANTO
33	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	8	4	DWI PUJI WINARTO
34	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	8	4	M.ZAINAL ABIDIN
35	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	8	4	WAHYU WIJANARKO
36	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	8	4	SAMIJEM
37	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	8	4	SUWANTO
38	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	9	5	JIRAH
39	INDRAGIRI	BATANG	PEMATANG	9	5	TUKINEM

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



	HULU	CENAKU	MANGGIS			
40	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	9	5	KAMDI
41	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	9	5	SRIATI
42	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	9	5	M. ARIF APRIYANTO
43	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	9	5	AHMAD SUJOKO
44	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	9	5	SALEM
45	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	9	5	DUL KAMID
46	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	9	5	SUPARWO
47	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	JUMRI
48	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	SALMAWATI
49	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	IKA FEBRIANI
50	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	SUDIMAN
51	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	KATEMI
52	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	SUYETNO
53	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	HARIYADI
54	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	TRIANTO
55	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	M.YATIM
56	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	ALIF SUPRIYADI
57	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	SARJIANTO
58	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	12	6	IKHSAN MAULANA
59	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	6	3	NINA LESTARI
60	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	12	6	HARTATIK

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

61	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	ZAINAL ABIDIN
62	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	SITI NURJANAH
63	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	DJOJOK SETIONO
64	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	9	5	RIKI ROYNALDI
65	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	6	3	PAHRI
66	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	WASTOYO
67	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	ABU KOMARUDIN
68	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	6	3	SUSANTO
69	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	MENIK
70	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	12	6	PERI IRAWAN
71	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	SAMAN HUDI
72	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	12	6	MIFTACHUL HUDA
73	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	SELAMET
74	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	HENDRIK KUSWOYO

*Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2021*

BLT-Dana Desa ini sangat membantu keluarga-keluarga miskin akibat pandemic covid-19. Sebelum penerimaan BLT-Dana Desa tentunya terdapat sosialisasi kepada KPM yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Proses sosialisasi dilakukan dikantor Desa Pematang Manggis yang berisikan pengarahan mengenai apa itu BLT-Dana Desa dan untuk apa BLT-Dana Desa itu harus digunakan. Proses penyaluran BLT-Dana Desa melalui BANK BRI pada tahun 2020 berlaku selama 3 bulan saja, kemudian pada bulan selanjutnya hingga tahun 2021

pencairan uang BLT-Dana Desa dikantor Desa Pematang manggis, dimana pemerintah Desa memberikan informasi kepada KPM bahwa uang sudah bisa dicairkan yang kemudian KPM mengambil uang tersebut dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP sebagai syarat mengambil uang bantuan serta mengisi absen sebagai bukti bahwasanya KPM yang bersangkutan telah mengambil dana BLT-DD tersebut.

Terdapat perbedaan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Pematang Manggis dimana pada tahun 2020 bantuan diberikan melalui Bank yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai penyalur BLT-Dana Desa dan hanya berjalan selama 3 bulan, namun pada bulan selanjutnya hingga tahun 2021 BLT-Dana Desa diberikan secara langsung kepada KPM. Pada tahun 2020 uang BLT-Dana Desa dicairkan melalui Bank BRI yang hanya berjalan selama 3 bulan saja dan hanya berlaku bagi masyarakat yang memiliki buku rekening. Dikarenakan masyarakat penerima bantuan tidak banyak yang memiliki rekening di Bank yang berkaitan, hal ini mengakibatkan pencairan dana BLT menjadi tidak efektif, oleh karena itu pada bulan selanjutnya hingga saat ini pencairan BLT-Dana Desa dialihkan melalui pemerintah Desa.

BLT-Dana Desa tentunya harus digunakan sebagaimana mestinya dan harus tepat sasaran dalam pendataannya agar tujuan dari BLT-Dana Desa dapat terwujud. Namun dari data yang penulis uraikan diatas masih ditemukan beberapa keluarga yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan tersebut. Dari 74 keluarga yang tercatat sebagai penerima BLT-Dana Desa 28 diantaranya merupakan keluarga sudah mampu namun tetap tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.

Berikut data penerima BLT-Dana Desa keluarga mampu:

**Table II.1 Data keluarga mampu penerima BLT-Dana Desa**

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA	RT	RW	NAMA
1	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	1	1	TUBIYO
2	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	1	1	SARWONO
3	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	2	1	SUMARNI
4	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	DARSONO
5	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	SUJARWANT O
6	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	3	2	JOKO TRIYONO
7	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	6	3	ANDIKA SAPUTRA
8	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	7	4	SUROYO
9	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	7	4	SUPRIYANTO
10	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	8	4	AGUS SUTRIYANTO
11	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	8	4	DWI PUJI WINARTO
12	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	8	4	M. ZAINAL ABIDIN
13	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	9	5	M. ARIF APRIYANTO
14	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	9	5	SUPARWO
15	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	SALMAWATI
16	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	SUDIMAN
17	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	SUYETNO
18	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	HARIYADI
19	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	TRIANTO
20	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	SARJANTO
21	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	12	6	IKHSAN MAULANA
22	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	6	3	NINA LESTARI

23	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	6	3	HARTATIK
24	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	ZAINAL ABIDIN
25	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	WASTOYO
26	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	10	5	ABU KOMARUDIN
27	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	12	6	PERI IRAWAN
28	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	11	6	SELAMET

*Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2021*

Keluarga-keluarga mampu diatas yang masih tercatat sebagai penerima bantuan, merupakan keluarga yang sudah tidak termasuk kedalam kriteria kurang mampu menurut keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang kriteria fakir miskin. kriteria nya sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
- b. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan lanjutan tingkat pertama
- c. Mempunyai dinding rumah yang tidak layak, seperti terbuat dari bamboo/kayu/tembok berkualitas rendah
- d. Kondisi lantai tidak layak atau berkualitas rendah
- e. Atap terbuat dari ijuk/genteng/semem dengan kualitas rendah
- f. Mempunyai penerangan bangunan bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
- g. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m<sup>2</sup>/orang
- h. Sumber air tak terlindung atau tidak bersih

- i. Mempunyai pengeluaran yang sebagian besar untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
- j. Tidak mampu atau kesulitan berobat ke tenaga medis
- k. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga

Berdasarkan observasi awal penulis mengenai implementasi BLT-Dana Desa di Desa Pematang Manggis terdapat beberapa fenomena penelitian yaitu:

1. terindikasi kurangnya tepat sasaran atas BLT-Dana Desa yang diberikan kepada KPM. Dimana penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, dan sebaliknya ada yang terlihat lebih layak menerima justru tidak menerima bantuan tersebut akibat data yang tidak akurat.
2. Selain itu karena banyaknya jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah mengakibatkan data yang tidak sinkron seperti beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda.
3. pendataan KPM yang kurang transparan.

Berikut beberapa keluarga yang mendapat bantuan ganda yaitu:

**Table III.1 data masyarakat penerima bantuan ganda**

NO	NAMA KPM	JENIS BANTUAN
1	SUMARNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLT-DD</li> <li>• RASKIN (Bantuan Beras Miskin)</li> </ul>
2	JUMRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLT-DD</li> <li>• BPNT</li> </ul>

3	YANTO SUGIYEM (merupakan dua orang dalam satu Kartu Keluarga mendapat 3 jenis bantuan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLT-DD</li> <li>• PKH</li> <li>• RASKIN (Bantuan Beras Miskin)</li> </ul>
---	--	--

*Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2021*

Fenomena ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat. Menurut Grabowsk, Rizzo, dan Grig (Ira Novianty, et al, 2020) menyatakan bahwa pendataan merupakan tantangan utama dalam mengalokasikan sumber daya terlebih lagi pada masa bencana ataupun kondisi dinamis, dimana data warga penerima bantuan setiap harinya akan mengalami perubahan, seiring dengan bertambahnya warga rentan miskin yang menjadi miskin, ataupun warga yang tidak miskin tetapi harus menerima bantuan karena wilayahnya terdampak covid-19.

Penelitian ini belokasi di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Dari fenomena yang telah penulis uraikan diatas penulis memiliki alasan mengapa mengambil Judul Penelitian Mengenai Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwasanya dengan tulisan ini penulis ingin mengetahui apakah BLT-Dana Desa di Desa Pematang Manggis tersalurkan secara tepat sasaran, serta ingin mengetahui bagaimana implementasi pendataan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa pematang Manggis.

Terkait dengan fenomena pandemic yang sedang dialami oleh banyak Negara salah satunya Indonesia yang merupakan Negara terdampak COVID-19 banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dari kebijakan covid-19, serta masyarakat yang menjadi miskin atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Desa Pematang Manggis merupakan salah satu Desa yang memiliki jumlah masyarakat kurang mampu cukup banyak sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah pun beragam. Karena banyaknya bantuan tersebut terdapat data yang tidak sinkron atau data penduduk yang mendapat bantuan ganda.

Isu ini sudah cukup lama beredar dan diperbincangkan oleh masyarakat Desa Pematang Manggis. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui lebih dalam apa yang menjadi akibat dari data yang tidak sinkron dan KPM penerima bantuan ganda tersebut, selanjutnya informasi didapat dari informan yang merupakan sumber data atau orang yang memberikan keterangan pada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat pandemic.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu : **Bagaimana Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu?**

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sebagai upaya mempertahankan kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mengetahui factor penghambat implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

## D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terutama yang memiliki judul penelitian berkaitan dengan Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa) Sebagai Upaya Penanganan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

b. Kegunaan Teoritis,

- 1) Bagi Daerah atau tempat yang menjadi lokasi penelitian, tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun evaluasi bagi pemerintah Desa terutama Pemerintah yang bertugas mengurus atau mengawasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini (BLT-Dana Desa)
- 2) bagi penulis sendiri adalah selain tulisan ini sebagai tugas akhir dari perkuliahan Strata Satu (S1) tulisan ini dapat menjadi wadah bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.



## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Studi Kepustakaan**

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengikutsertakan beberapa konsep teoritis yang dianggap relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variable yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

##### **1. Konsep Ilmu Pemerintahan**

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan atau ilmu yang berkaitan dengan bagaimana dalam memerintah suatu organisasi atau daerah mampu berbuat serta dengan kharismatik dan cara nya sendiri menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah Karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2011:20).

Menurut MacIver (Nia Karniawati, 2015) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan asal mula terjadinya pemerintahan, kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk pemerintahan yang ada, seperti hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, mekanisme pemerintahan, dan fungsi-fungsi

pemerintahan. Pemerintah menurut Ndraha (2015) merupakan sebuah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, Badan atau Organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pemerintahan secara etimologis berasal dari kata Yunani ‘Kubernan’ atau nahkoda kapal. Pemerintahan adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan. Pemerintah diorientasikan pada kemajuan sebuah Negara. Kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan. Setelah mendapat awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi mengurus. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan menjadi perbuatan, cara atau perihal. (Syafi’i, 2013:12)

Ilmu pemerintahan tidak dapat berdiri sendiri, namun membutuhkan ilmu lain untuk mengembangkan ilmu pemerintahan. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya dengan wajar. Pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan bagi masyarakat, terbentuknya pemerintah tidak untuk melayani dirinya sendiri melainkan untuk melayani masyarakat luas, menciptakan kondisi dan lingkungan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Inu Kencana syafiie (2011;23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Eksekutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pemerintah pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Selanjutnya menurut Musanef (Nia Karniawati, 2015) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Menurut H. A. Brasz ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai cara sebuah lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan dengan baik kedalam maupun keluar terhadap warganya. Sedangkan U. Rosenthal mengatakan bahwa ilmu pemerntahan merupakan ilmu yang menggeluti sebuah studi mengenai penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. (Syafi'i, 2013:21)

Pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan public dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara. Ilmu pemerintahan dengan pemerintah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Seseorang yang menjalankan kebijakan Negara harus memiliki ilmu dalam memerintah disuatu negara.

## 2. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Menurut (Ndraha (dalam Labolo), 2014: 37) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

a. Fungsi Primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil, dan layanan birokrasi.

b. Fungsi Sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder atau pemberdayaan adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah atas barang dan jasa dimana masyart tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak mampu termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labolo, 2014: 37-38) berpendapat bahwa fungsi pemerintahan adalah:

a. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang sering disebut fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang

tepat sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, sehingga terciptanya tatanan yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

b. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan merupakan tindakan yang memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat negara selanjutnya akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat.

c. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi yang mendorong kemandirian kemasyarakatan sehingga menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat

d. Fungsi pembangunan

Dengan adanya fungsi pemberdayaan maka secara tidak langsung tercipta pula fungsi pembangunan. dengan terlaksananya fungsi pemberdayaan dan pembangunan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhan kehidupannya

Pemerintah menurut Ndraha (2015:6) merupakan organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap masyarakat menerima apa yang sedang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Perintahan merupakan sekelompok orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan suatu tindakan (eksekusi) atau tidak melakukan

apapun (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara department dan unit-unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri (Syafi'i. 2014:12)

Penyelenggaraan pemerintah dalam pemberdayaan maupun pembangunan masyarakat menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Pada era otonomi daerah dan pada kondisi seluruh negara yang sangat memperhatikan termasuk Indonesia merupakan salah satu negara dengan daerah yang terbagi atas daerah otonom sangat memerlukan peran serta pemerintah dan masyarakat untuk saling bekerjasama dalam menciptakan kondisi yang lebih baik demi kesejahteraan bersama. Salah satu upaya pemerintah dalam membuat kebijakan dan program-program sebagai upaya membantu kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang tepat pada kondisi saat ini. Namun ketidakselarasan fakta dan tujuan utama dari terciptanya kebijakan dan program yang telah dibuat cukup membuat pemerintah dan masyarakat merasa terbebani.

### **3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:129) mengatakan implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau sebuah penerapan. Dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Dyah Ayu Larasati, et al. 2008) menjelaskan bahwa implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan Menurut William N. dunn (dalam Harbani Pasolog, 2008:39) berkata bahwasannya kebijakan publik merupakan sesuatu rangkaian pilihan bersama



yang dibuat oleh lembaga ataupun pejabat pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pembelajaran, kesejahteraan penduduk, kriminalitas, perkotaan serta lain-lain.

Siagian (dalam Anggara, 2012:508) berkata bahwasannya kebijakan merupakan bermacam penganalisis keputusan yang strategis serta menyangkut totalitas organisasi dan berkaitan dengan perihal yang menilainya strategis ditinjau dari sudut kepentingan organisasi yang pada gilirannya membolehkan menggapai tujuan yang sudah diresmikan menurutnya.

Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) mengatakan bahwa sebuah kebijakan adalah hasil dari perbedaan pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Oleh karena itu untuk memahami sebuah kebijakan diperlukan pedoman-pedoman, sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari sebuah keputusan
2. Kebijakan tidak selalu dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan
4. Kebijakan mencakup ada dan tidaknya suatu tindakan
5. Kebijakan memiliki hasil yang akan dicapai
6. Kebijakan memiliki tujuan dan sasaran baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari sebuah proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan antar organisasi dan intra organisasi
9. Kebijakan public meskipun tidak eksklusif namun menyangkut peran kunci lembaga pemerintah

10. Kebijakan dirumuskan secara subyektif.

Kebijakan public berkaitan dengan segala hal yang mencakup berbagai bidang kehidupan bersama, pada semua urusan pemerintahan sedari pusat hingga daerah. Sebagaimana dikutip Nugroho (dalam Y. Gede Sutmasa, 2021) mengatakan bahwa kebijakan public merupakan segala hal yang dikerjakan oleh instansi/badan pemerintah, disertai dengan alasan mengapa mereka membuat kebijakan tersebut dan hasil dari kebijakan yang menimbulkan kehidupan bersama tampil beda. Kebijakan public yang tidak baik dan gagal dalam pengimplementasiannya akan berujung pada kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. yang artinya masyarakatlah yang akhirnya menjadi korban kegagalan sebuah kebijakan.

Carl Friedrich dalam (Solichin Abdul wahab, 2012:9) menyatakan bahwa suatu kebijakan ialah sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan yang telah diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seiring dalam mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Dyah Ayu Larasati, et al. 2008) menjelaskan bahwa implementasi merupakan pemahaman yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan dirumuskan perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman kebijakan public yang menyangkut baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Implementasi kebijakan tidak dapat dilaksanakan sebelum tujuan dan sasarannya ditetapkan oleh keputusan dari sebuah kebijakan tersebut. Implementasi merupakan sebuah proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai actor yang pada akhirnya mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan itu sendiri. Dikatakan oleh (Edward III (dalam Subarsono), 2005, pp. 90-92) berpendapat bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan sebuah implementasi kebijakan yaitu factor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

Untuk mengetahui lebih lengkapnya mengenai 4 faktor tersebut dibawah ini :

a. Komunikasi

Merupakan keberhasilan suatu kebijakan mengharuskan agar implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran suatu kebijakan harus tersampaikan kepada kelompok sasaran secara tepat sehingga meminimalisir adanya penyimpangan implementasi.

b. Sumber Daya

Selain komunikasi harus dilakukan secara jelas dan konsisten, tetapi jika implementor kekurangan dalam hal sumber daya maka implementasi suatu kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu kebijakan seperti sumber daya manusia yang memiliki kompetensi cukup baik dan sumber daya finansial.

c. Disposisi

Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Implementor yang memiliki disposisi yang baik akan menjalankan kebijakan dengan efektif seperti yang diinginkan. Jika implementor memiliki sikap maupun perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka dalam proses implementasi akan mengakibatkan ketidak efektifan.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi maupun struktur organisasi merupakan seseorang yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, hal ini memiliki pengaruh yang signifikan dengan implementasi suatu kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standar Operating Procedure (SOP). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, hal ini dapat mengakibatkan aktivitas organisasi tidak efektif.

Implementasi merupakan suatu hal yang berkenaan dengan berbagai kegiatan yang mengarah pada terlaksanakannya suatu program yang telah disepakati bersama. Implementasi kebijakan merupakan sebuah tahap yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Pada tahap implementasi ini dapat diketahui apakah program yang telah disepakati dapat terealisasi dengan baik dan menghasilkan output atau outcomes sesuai dengan target program yang telah ditetapkan. (Ahmad Mustanir, Darmiah. 2016)

Menurut Ripley dan Franklin dalam (Nikmtul Nur jannah, 2018) berpendapat bahwa

“implementasi adalah suatu hal yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan dengan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau keluaran yang nyata”

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara sebuah kebijakan itu sendiri menemukan cara untuk mencapai tujuan. Dalam pengimplementasian kebijakan public terdapat dua cara atau dua pilihan yaitu dengan mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan.

Sementara itu Grindle dalam (Nikmtul Nur jannah, 2018) memberikan pandangan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan yang direalisasikan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah.

#### **4. Konsep Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansakerta, yang berarti Tanah Air, Tanah asal kelahiran. Di dalam

sebuah Desa terdapat pemimpin yang akan mengatur dan mengurus urusan Desa yang disebut dengan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif di Desa, memiliki tugas membina kehidupan bermasyarakat di Desa, membina perekonomian masyarakat Desa, menjaga kesejahteraan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa serta menjadi penengah jika terdapat perselisihan antar masyarakat Desa. Selain itu pemerintah Desa juga bertugas mengajukan rancangan peraturan dan menetapkan peraturan tersebut sebagai peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut R.H Unang Soenardjo mengatakan Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang memiliki batas tertentu. Memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat dikarenakan keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. (Hanif Nurcholis, 2011:4)

R.Bintaro mengatakan bahwa Desa merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang didalamnya terdapat hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. (Hanif Nurcholis, 2011:4)

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh selompok penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan

adat istiadat sehingga tercipta ikatan lahir batin antar masing-masing warganya, umumnya masyarakat Desa hidup melalui hasil pertanian, memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Penyelenggaran pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi yang terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa terdiri atas:
  - 1) Secretariat Desa, yaitu staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
  - 2) Unsur pelaksana Teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti pengaran, keagamaan, dan lain-lain
  - 3) Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa colonial dan sesudahnya diberlakukan telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli.

Dalam menjalankan pemerintahannya, masyarakat Desa tidak mendapat petunjuk atau pengaturan dari kerajaan di atasnya karena memang mereka tidak berada dibawah kerajaan. Masyarakat Desa adalah orang-orang bebas yang mendirikan komunitas aas inisiatif sendiri dibawah seorang tokoh yang mereka

hormati dan segani. Dalam mengatur tata cara kemasyarakatannya mereka mencari sistem sendiri berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri atas tata pengaturan masyarakat.

Lembaga pemerintahan dan ekonomi yang mereka bentuk bukan diatur atau ditentukan oleh pemerintah di atasnya melainkan mereka bentuk sendiri. Begitu juga sistem kerjanya, lembaga yang mereka buat membentuk sistem kemasyarakatan yang fungsional. Oleh karena itu, mereka dapat membentuk kehidupan yang otonom mandiri. Mereka dapat memenuhi kebutuhan dengan sistem yang mereka kembangkan sendiri tanpa campur tangan pihak manapun.

Pemerintahan desa adalah cara atau perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintahan tersebut akan menghasilkan pemerintahannya. Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan menempati suatu daerah dan mempunyai hubungan baik antar sesamanya. Pada umumnya kehidupan dimasyarakat Desa meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan sosial budaya yang mana keseluruhan aspek tersebut harus dijaga dan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapat kehidupan yang lebih baik dan layak.

#### **5. BLT-Dana Desa**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang yang diberikan kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk membantu mengurangi dampak Covid-19. Adapaun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga (3) bulan selanjutnya Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT–Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa



melebihi ketentuan maksimal yang dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Walikota. Namun usulan tersebut harus disertai dengan alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Menurut Wynandin Imawan (Maun, C.E, 2021) mengatakan bahwa program bantuan langsung tunai merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Klaster pertama, yaitu Program Bantuan Dan Perlindungan Sosial seperti Proram Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beasiswa. Pada klaster II, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pelaksanaan klaster III yaitu, Program Pemberdayaan Usaha Menengan Kecil (UMK).

Program bantuan langsung tunai merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut berisikan nilai-nilai yang bertujuan untuk memecahkan persoalan public dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Salah satu persoalan public yang kini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah yaitu kemiskinan. program bantuan langsung tunai dilatarbelakangi oleh upaya dalam mempertahankan perekonomian Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau masyatakat miskin akibat pandemic. Adapun tujuan dari program BLT yaitu :

- Membantu masyarakat yang tergolong miskin agar tetap terpenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari
- Mencegah penurunan taraf Kesejahteraan masyarakat akibat kesulitan ekonomi
- Meningkatkan dan menjaga tanggung jawab sosial bersama.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan yang di prioritaskan bagi keluarga miskin terdampak Covid-19 sehingga kehilangan mata pencaharian. Selain itu semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yang terpenuhi semakin menjadi prioritas sebagai penerima Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam hal ini tentunya peran pemerintah sangatlah penting dalam kesejahteraan perekonomian masyarakat miskin. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yaitu berupa kewajiban untuk membantu mewujudkan dan menjaga kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah perekonomian yang tidak akan pernah hilang dari kehidupan bernegara bahkan masalah kemiskinan merupakan isu global yang dihadap oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesias. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2018). Hak-hak dasar yan dimaksud yaitu

- 1) Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 2) Rasa aman dari ancaman atau tindak kekerasan

### 3) Hak dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik

Pemerintah harus tepat sasaran dalam melaksanakan program ini harus peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta berbagai permasalahan, selain itu pemerintah juga bersifat transparan sehingga dengan mudah diketahui oleh seluruh masyarakat dan berbagai pihak lainnya Nasdian (dalam Sri Wibawani, 2021)

## 6. Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan terhadap Desa yang bertujuan untuk mendorong kemandirian Desa serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah dalam pengelolaan Dana Desa. Pemanfaatan Dana Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah pemanfaatan Dana Desa yang diarahkan terhadap pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dana Desa tidak dapat digunakan sembarangan dalam pemanfaatannya. Desa dituntut untuk mampu dalam menyusun perencanaan program dan melaksanakan program tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu program yang bertujuan untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat. Desa harus cerdas dalam pemanfaatan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat yang berjumlah cukup besar, pemanfaatan Dana Desa harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan potensi Desa itu sendiri.

Salah satu program yang dapat dilaksanakan pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa adalah untuk membantu mengentaskan kemiskinan di

Desa itu sendiri. Pada masa pandemic seperti ini banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terjadi pada tahun 2019-2020. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat pengurangan pegawai, atau pedagang yang hanya memanfaatkan hasil dagangannya untuk makan sehari-hari tetapi harus berdiam diri dirumah (stay at home) untuk menaati kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Saat Indonesia mulai membaik tingkat penularan covid-19 kembali memuncak hingga mengharuskan pemerintah untuk kembali membuat kebijakan yang membuat masyarakat diseluruh Indonesia mengalami kemiskinan, kehilangan pekerjaan dan harus kembali tetap berada dirumah. Melihat fenomena ini badan atau instansi pemerintah yang terdekat dengan masyarakat adalah pemerintah Desa. Pemerintah Desa dituntut untuk dapat membantu kehidupan masyarakat Desa agar tetap sejahtera. Dalam hal ini Pemerintah Pusat memberikan Bantuan berupa BLT Dana Desa yang pengelolaannya diberikan sepenuhnya kepada Desa dengan pengawasan pemerintah Kabupaten.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan untuk desa, bantuan dari APBN diharapkan menjadi sumber pendapatan desa untuk menunjang pembangunan di desa. Dana desa sepenuhnya diberikan oleh negara untuk memfasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Dana Desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. selanjutnya tujuan dari pemberian Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki prioritas utama bagi Desa yaitu pembangunan dan pemberdayaan, bukan hanya pembangunan dalam hal fisik Desa saja yang harus diperhatikan tetapi dalam pemberdayaan masyarakat Desa sehingga dapat menumbuhkan kemandirian Desa dalam memenuhi kebutuhan dan meminimalisir kemiskinan.

Dikatakan oleh Maun (Endik Hidayat 2020) Dana Desa adalah alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan secara langsung oleh Desa sebagai upaya dalam mengurangi dampak akibat pandemic Covid-19 ditingkat Rumah Tangga maupun Desa. Namun dalam implementasi penerapan BLT-Dana Desa ini masih terdapat berbagai macam permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan program BLT.

### B. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang hampir sama telah lebih dulu diteliti oleh beberapa penulis yang di upload dalam laman jurnal Nasional, sehingga penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi acuan atau referensi bagi penulis. Namun tetap ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang dilaksanakan oleh penulis.

**Table IV.2 penelitian terdahulu**

No	NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	Ira Novianty, Iwan Setiawan, Fifi Afianti,	Praktik Penganggaran Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Dimasa	a. Membahas BLT-DD b. Problematika ketidakakuratan data penduduk KPM	a. Tujuan penelitian deskriptif eksploratif

	Edman Syarif, Arwan Gunawan Sudrajat, Djoni Djatnika. (2020)	Pandemic Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kab Bandung Barat)	sehingga terdapat salah sasaran c. Menunjukkan banyaknya jenis bantuan yang diterima oleh warga	b. Metode penelitian yang digunakan c. Penelitian ini menggunakan focus group discussion (FGD) dengan perangkat desa
2.	Binar Dwiyanto Pamungkas, Suprianto Usman, Roos Nana Sucihati Vivin Fitriyani. (2020)	Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Sumbawa	a. Mendeskripsikan penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 dalam penanganan covid-19 b. Dasar hukum yang digunakan c. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	a. Penelitian ini mendeskripsikan beberapa penggunaan dana desa tahun 2020 dalam penanganan covid-19 seperti; 1). Penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan covid-19. 2). Padat karya

				tunai. 3). BLT DD
3.	Refendy Paat, Sofia Pangemanan, Frans Singkoh. (2021)	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan	a. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif b. Memiliki tujuan BLT DD c. Teori yang digunakan d. Subyek penelitian	a. Penyaluran/ pencairan dana BLT berbeda
4.	Teguh Imam Rahayu, Ali Gufron. (2020)	Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Didesa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak	a. Tujuan penelitian b. Untuk mengetahui factor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan penggunaan dana desa c. Metode penelitian deskriptif kualitatif	a. Focus penelitian b. Teori yang digunakan

5.	Endik Hidayat. (2020)	Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemic Covid-19 Disampang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami implementasi kebijakan dana desa</li> <li>b. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teori yang digunakan</li> <li>b. Focus penelitian</li> </ul>
6.	Bakri La Suhu, Rahmat Suaib, Isman Abdul, Marno Wance. (2021)	Benang Kusut Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Dipulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi Tentang Implementasi Pembagian BLT-DD diDesa Mano)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan penelitian</li> <li>b. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif</li> <li>c. Dasar hukum yang digunakan</li> </ul>	a. Teori yang digunakan

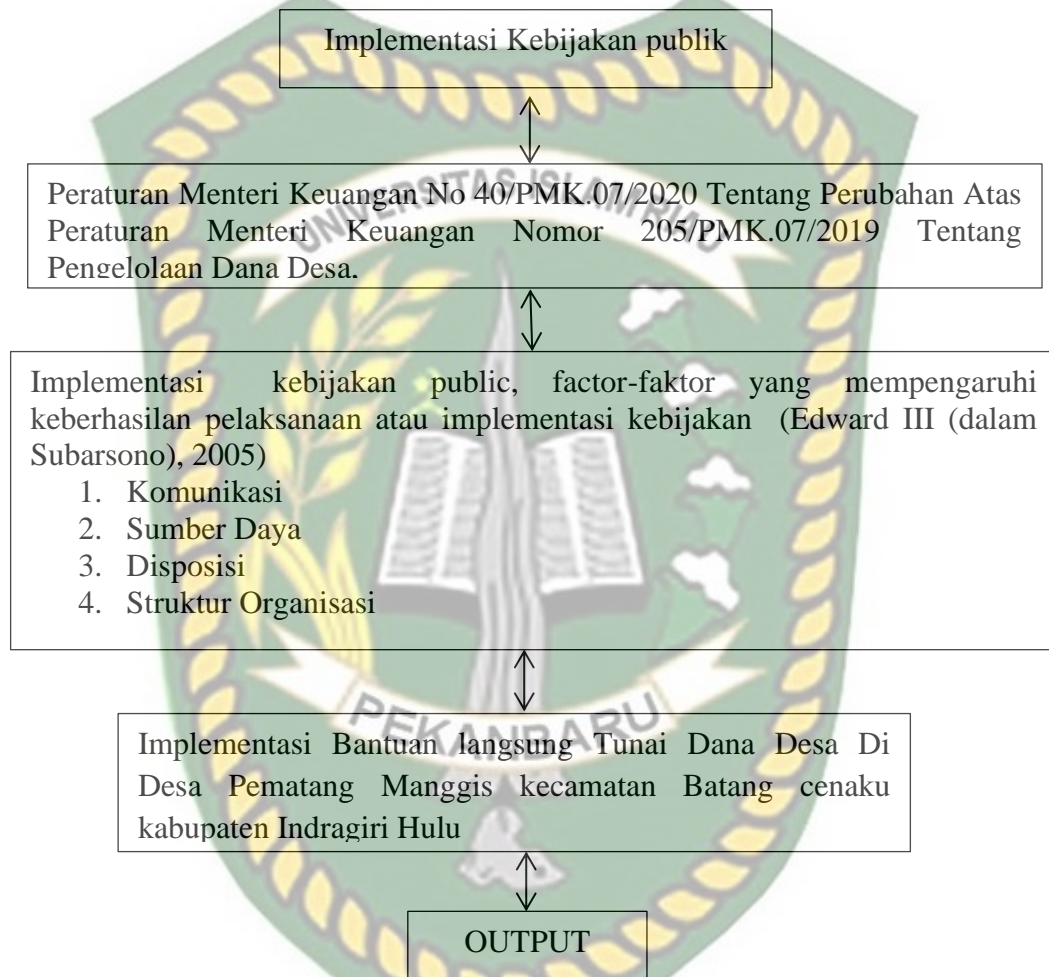
### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk menggambarkan mengenai keterkaitan antara variable penelitian dengan indicator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep maupun teori yang dianggap relevan dengan judul penelitian. Adapun



kerangka pikir sebagai konsep untuk menganalisis variable dalam penelitian ini, selanjutnya digambarkan dengan bagan dibawah ini :

**Gambar I.2 kerangka pikir**



*Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2021*

#### **D. Konsep Operasional**

Konsep operasional merupakan sebuah konsep abstrak terhadap suatu pengukuran suatu variable, atau sebagai panduan saat melakukan suatu penelitian atau kegiatan. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penggunaan konsep serta meminimalisir kesalahan pengertian dari istilah-istilah yang

digunakan dalam penelitian ini, penulis memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan dilapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pemerintah

Pemerintah adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pemerintah berfungsi sebagai pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan terhadap masyarakat serta memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kelapa Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Teori George C. (Edward III (dalam Subarsono), 2005) berpendapat bahwa keberhasilan Implementasi dipengaruhi oleh 4 variable yaitu:

1. Komunikasi

Merupakan keberhasilan suatu kebijakan mengharuskan agar implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran suatu kebijakan harus tersampaikan

kepada kelompok sasaran secara tepat sehingga meminimalisir adanya penyimpangan implementasi.

## 2. Sumber Daya

Selain komunikasi harus dilakukan secara jelas dan konsisten, tetapi jika implementor kekurangan dalam hal sumber daya maka implementasi suatu kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu kebijakan seperti sumber daya manusia yang memiliki kompetensi cukup baik dan sumber daya finansial.

## 3. Disposisi

Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Implementor yang memiliki disposisi yang baik akan menjalankan kebijakan dengan efektif seperti yang diinginkan.

## 4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi maupun struktur organisasi merupakan seseorang yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, hal ini memiliki pengaruh yang signifikan dengan implementasi suatu kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standar Operating Procedure (SOP).

### d. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang yang diberikan kepada keluarga miskin di desa yang

bersumber dari Dana Desa untuk membantu mengurangi dampak Covid-19. Nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga (3) bulan selanjutnya Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT–Dana Desa ini bebas pajak.

e. Dana Desa

Dalam PMK 40/2020 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai.

f. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global diseluruh dunia.

### E. Operasional Variabel

Operasional variable adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variable dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Operasional variable merupakan cara untuk mendeskrisikan atau memberikan gambaran suatu operasional/pekerjaan yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut.

Table V.2 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
<p>(Edward III (dalam Subarsono), 2005) berpandangan bahwa terdapat empat factor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komunikasi</li> <li>2) Sumber Daya</li> <li>3) Disposisi</li> <li>4) Struktur Birokrasi</li> </ol>	<p>Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. komunikasi</li> <li>2. Sumber Daya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa)</li> <li>2) Pelaksanaan sosialisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)</li> <li>3) Memberi informasi mengenai pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dan Desa)</li> <li>1) Kompetensi pemerintah yang bertugas dalam pengawasan dan mengontrol Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) agar tepat sasaran</li> <li>2) Mekanisme dan alur pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)</li> <li>3) Menyediakan fasilitas tempat</li> </ol>

		<p>3. Disposisi</p> <p>4. Struktur Birokrasi</p>	<p>pertemuan dalam sosialisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)</p> <p>1.) Program pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) dilakukan secara tepat sasaran dan transparan</p> <p>2.) Kebijakan KPM (BLT-Dana Desa) dalam menggunakan bantuan dana tersebut</p> <p>1) Koordinasi Pemerintah Desa dengan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)</p> <p>2) Menyediakan bidang khusus dalam mengontrol jalannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)</p>
--	--	--	---

Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2021

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan serta menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan dengan berbagai kegiatan.

John Creswell (2008:6) mengatakan bahwa penelitian merupakan suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai sejak identifikasi masalah maupun isu yang akan diteliti. Setelah masalah tersebut teridentifikasi selanjutnya mereview bahan bacaan atau kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya memperjelas atau menentukan tujuan dari penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan menganalisis data. Kemudian menafsirkan data yang diperoleh. Proses indentifikasi masalah ini semuanya berlangsung dalam suatu proses yang bertahap secara teratur dan sistematis. Lebih jelasnya penelitian menurut Creswell terdiri dari:

- Masalah
- Review Literature
- Tujuan dari penelitian
- Pengumpulan data
- Interpretasi
- Laporan

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari pada partisipan maupun informan, menganalisis data secara induktif.

Creswell (2008:7) mendefinisikan penelitian dengan metode kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengetahui gejala sentral tersebut peneliti melakukan wawancara dengan peserta penelitian maupun partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas. Informasi yang didapatkan selanjutnya dikumpulkan kemudian di analisis. Hasil analisis tersebut dapat berupa penggambaran maupun deskripsi. Dari data-data yang peneliti dapatkan kemudian peneliti membuat interpretasi untuk menangkap makna paling dalam dari masalah penelitian tersebut.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan permasalahan atau fenomena yang ditemukan berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dari pengamatan awal penulis menemukan data dengan observasi awal, wawancara dengan informan atau penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa dan dokumentasi.

Penelitian menggunakan metode observasi karena peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan atau kenyataan dilapangan sehingga diperoleh



informasi yang jelas. Selain observasi penulis menggunakan metode wawancara untuk mengungkap data selengkap mungkin dari informan mengenai peran pemerintah desa serta mengenai hal-hal yang mengakibatkan ketidakakuratan data penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, yang mengakibatkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan dimana KPM yang tidak semestinya mendapat bantuan namun mendapatkan, dan sebaliknya ada yang lebih layak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan.

Melalui metode penelitian ini dengan focus agar tercapainya tujuan dari terlaksananya Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa yaitu meringankan atau membantu perekonomian bagi keluarga miskin serta keluarga yang terdampak pandemic Covid-19, penelitian ini juga membahas impementasi penerapan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa serta untuk mengetahui factor penghambat implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Pematang Manggis merupakan Desa yang turut serta menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah akibat pandemic Covid-19. Selain itu masyarakat Desa Pematang Manggis masih banyak memiliki masyarakat yang tergolong miskin, dimana dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari masih kurang mampu, apalagi saat ini Desa Pematang Manggis merupakan Desa yang terdampak Pandemi Covid-19.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Pematang Manggis, bahwasanya program BLT-DD merupakan program yang cukup membantu perekonomian masyarakat Desa Pematang Manggis yang terdampak pandemi Covid-19. Dari fenomena yang penulis temukan terindikasi ketidaktepatan dalam pemberian BLT-Dana Desa, dari 74 keluarga penerima bantuan 28 diantaranya merupakan keluarga mampu yang tidak layak mendapatkan bantuan tersebut, serta adanya bantuan ganda yang didapatkan oleh beberapa masyarakat. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi program BLT-Dana Desa serta proses pendataan calon penerima BLT-Dana Desa di Desa Pematang Manggis sebagai salah satu Desa yang terdampak Covid-19.

### **C. Informan Penelitian dan Key Informan Penelitian**

Informan merupakan seorang narasumber yang merujuk pada seseorang yang memahami terkait dengan objek yang sedang diteliti serta mampu memberikan penjelasan terkait topic penelitian.

Penentuan informan berdasarkan kelompok atau seseorang yang sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Informan penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian. *Key informan* atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli dan mengetahui segala informasi sesuai dengan fenomena yang diteliti. Selanjutnya penulis menyajikan informan mengenai BLT-Dana Desa di Desa pematang Manggis dalam bentuk table dibawah ini:

**Table VI.3 Informan penelitian**

NO	SUBJEK	INFORMAN
1	Sekretaris Desa	1
2	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	1
3	RT	1
4	RW	1
5	Keluarga layak menerima BLT-DD	2
6	Keluarga tidak layak menerima BLT-DD	2

Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2021

Berdasarkan informasi yang di dapat penulis melalui teknik wawancara dengan informan yaitu masyarakat penerima BLT-Dana Desa bahwasanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, sandang, papan dan lain-lain. Itu artinya BLT-Dana Desa yang tersalurkan di Desa Pematang Manggis digunakan sebagaimana mestinya.

Adapun *key informan* dalam penelitian ini guna menghimpun informasi-informasi yang dibutuhkan yang sifatnya data, maupun keadaan yang terjadi dilapangan adalah Kepala Desa Pematang Manggis yang merupakan seseorang yang mengetahui segala informasi mengenai perekonomian masyarakat serta implementasi BLT-Dana Desa di Desa Pematang Maggis.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diambil melalui hasil observasi secara langsung dilapangan berupa pengamatan awal penulis dan wawancara

langsung dengan informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati fenomena tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini informan penelitian yaitu pemerintah Desa yang menangani BLT-Dana Desa yaitu Kaur umum Desa Pematang Manggis dan Masyarakat penerima Program Bantuan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperlukan sebagai sumber untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan mendukung hasil penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan bahan tertulis yang terdapat pada kantor Desa Pematang Manggis. Data sekunder yang dibutuhkan yaitu data yang relevan dengan judul penelitian, peraturan-peraturan, maupun dokumen dan arsip penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Observasi

Menurut Creswell (2016:254) Observasi adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu serta fenomena yang terjadi dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat informasi baik secara terstruktur mau semistruktur seperti dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti).

Teknik observasi merupakan aktivitas memahami suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian menganalisis sebuah fenomena yang ditemukan.

## 2. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016:254) dalam teknik wawancara peneliti dapat melakukannya dengan cara *face to face interview* atau wawancara berhadap-hadapan dengan partisipan, mewawancarai melalui media telepon, atau bahkan terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu).

Teknik interview/wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumen-dokumen, seperti gambar yang diambil ketika observasi/wawancara maupun bentuk lainnya.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan datanya yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus, analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu jenis analisis berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, yang selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu kemudian menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan

sejak sebelum memasuki lapangan, seperti hanya dengan mendengar isu-isu fenomena yang terdengar oleh penulis maupun yang tersebar di sosial media, kemudian selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.

Dalam Sugiyono (2015:254) mengatakan bahwa analisis telah mulai dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung secara terus menerus sampai pada penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif analisis data terfokus selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam sebuah penelitian, dengan melakukan analisis data dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif, yaitu analisis data dengan menarik kesimpulan yang berangkat dari fenomena atau isu khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

**G. Lama Waktu Penelitian**  
**Table VII.3 Waktu penelitian**

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN, BULAN DAN MINGGU 2021-2022																															
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x																												
2.	Bimbingan UP					x	x	x	x	x	x	x																					
3.	Seminar UP																																
4.	Revisi UP																																
5.	Revisi U													x	x																		
6.	Penelitian Lapangan															x	x	x															
7.	Pengelolaan dan Analisis Data																			x	x												
8.	Penyusunan Hasil Penelitian																					x	x										
9.	Konsultasi Bimbingan Skripsi																							x	x	x	x						
10.	Ujian Skripsi																													x	x	x	

Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2021



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu**

Kabupaten Indragiri hulu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Riau yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 dibentuk kabupaten Indragiri yang termasuk didalamnya Provinsi Sumatra tengah dan diralisi dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra tengah pada tanggal 9 november 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1952 dan Undang-Undang nomor 12 1956 dibentuk daerah otonom dalam provinsi Sumatra tenah termasuk kabupaten Indragiri.

Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 14 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Rengat
2. Kecamatan Batang Peranap
3. Kecamatan Seberida
4. Kecamatan Batang Cenaku
5. Kecamatan Rakit Kulim
6. Kecamatan Pasir Penyu
7. Kecamatan Lirik
8. Kecamatan Sei-Lala
9. Kecamatan Lubuk Batu Jaya
10. Kecamatan Rengat Barat
11. Kecamatan Kuala Cenaku
12. Kecamatan Batang Gansal



13. Kecamatan Peranap

14. Kecamatan kelayang

Semenjak berdiri kabupaten Indragiri Hulu telah dipimpin oleh 17 Bupati,

yaitu:

1. E. Ali datuk Bendahara Pejabat Bupati 1945-1947
2. Amir Hamzah Pejabat Bupati 1947-1948
3. Tulus (Pati) Pejabat Bupati 1948-1949
4. Umar Usman Bupati Militer 1949-1952
5. Raja Yamin Pejabat Bupati 1952-1952
6. Oedin Bupati Indragiri 1952-1955
7. Datuk Wan Abdurrahman Bupati Indragiri 1955-1956
8. Datuk Ahmad Bupati Indragiri 1956-1958
9. Tengku Bey Bupati Indragiri 1958-1960
10. H. Masnoer Bupati INHU 1960-1976
11. Doelharsono, SH Bupati INHU 1976-1984
12. Tata suparta Bupati INHU 1984-1989
13. Ruchiyat Saefudin Bupati INHU 1989-1999
14. Drs. R. Thamsir Rachman Bupati INHU 1999-2008
15. Drs. H MUJTAHID THALIB Bupati INHU 2008-2010
16. Yopi Arianto, SE Bupati INHU 2010-2015, 2016-2021-Drs. H Chairul Riski,MS.MP PJ Bupati INHU 29 maret 2021- 4 juli 2021
17. Rezita Meylani Bupati INHU, 5 Juli 2021

## B. Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hulu

### 1. Luas dan Letak Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km<sup>2</sup> (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m diatas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak di:

1. 0°15' Lintang Utara
2. 1°5' Lintang Selatan
3. 101°10' Bujur Timur
4. 102°48' Bujur Timur

### 2. Iklim

Suhu dan kelembapan udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut dengan permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Suhu udara maksimum pada tahun 2009 yaitu 33,4°C, sedangkan suhu minimum berkisar pada 21,9°C. kelembapan udara maksimum cukup dingin yaitu 98°C. sedangkan kelembapan udara minimum berkisar pada 51°C dengan rata-rata kelembapan udara 83°C.

## C. Kondisi Demografi

### 1. Jumlah Penduduk

jumlah penduduk dikabupaten Indragiri Hulu 430.230 Jiwa dan kepadatan penduduk 52,47 jika/km<sup>2</sup>. dan Ibukota Kabupaten berada di Kecamatan Rengat.

### 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Pengklasifikasian penduduk Indragiri Hulu berdasarkan jenis kelamin dapat ditemukan bahwa jumlah penduduk kabupaten Indragiri Hulu yang berjenis

kelamin laki-laki sebanyak 228.502 jiwa (51,40%) dan penduduk perempuan 216.046 jiwa (48,60%) tergabung dengan kecamatan sungai Lala dan kecamatan Lubuk Batu Jaya. Penduduk laki-laki dikabupaten Indragiri Hulu lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dengan seks ratio dikabupaten Indragiri Hulu sebesar 105,76 artinya terdapat 106 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Indragiri Hulu tahun 2020 sebanyak 54 jiwa perkilometer persegi.

### **3. Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia**

Untuk menunjang lajunya perekonomian kabupaten Indragiri Hulu maka kabupaten Indragiri Hulu harus memiliki jumlah penduduk angkatan kerja yang ideal dan produktif.

#### **D. Visi Misi Kabupaten Indragiri Hulu**

##### **1. Visi**

“Mewujudkan Indragiri Hulu Yang Lebih Sejahtera Tahun 2021”

##### **2. Misi**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan juga isu-isu strategi maka ditempuh melalui 7 misi sebagai berikut:

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
- Meningkatkan pengawasan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

- Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
- Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat daya saing daerah
- Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama dan profesi

#### **E. Struktur Pemerintah Desa Pematang Manggis**

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 39, menyebutkan “kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”

##### **1. Kepala Desa**

Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan desa, seperti menjalankan rumah tangganya sendiri sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa, urusan pemerintah umum, termasuk didalamnya ada ketentraman, ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuh kembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki tugas dan fungsi sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretariat desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa. Selain itu sekretaris desa juga membantu kepala desa dalam mempersiapkan serta melaksanakan pengelolaan administrasi desa, serta mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

## 3. Kepala Seksi kesejahteraan masyarakat

Kepala sub bagian kesejahteraan masyarakat atau yang disebut dengan Kaur Kesra memiliki tugas dan fungsi dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program-program pemberdayaan dan sosial masyarakat, membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana serta mengawasi pelaksanaannya, mengadakan usaha-usaha dalam menghimpun dana-dana sosial, menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olahraga. Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan berbagai kegiatan lainnya, serta penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang kesejahteraan masyarakat.

## 4. RT/RW

Rukun warga atau sering disebut dengan RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/ kelurahan dan

dipimpin oleh satu ketua RW. Sedangkan Rukun Tetangga atau RT merupakan lembaga yang menghimpun beberapa kepala keluarga (KK) disetiap desa/kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua. Tugas RT/RW yaitu:

- melancarkan pelayanan masyarakat meningkatkan kinerja pemerintah desa/kelurahan,
- mewujudkan masyarakat berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,
- memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotong royong, swadaya masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya,
- mendorong stabilitas nasional dari susunan paling kecil didalam masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa
- menjadi sarana penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah secara langsung
- memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai program kerja pemerintah
- mendukung pelaksanaan program pemerintah, dan
- Membina masyarakat dalam peningkatan taraf hidup yang lebih berkualitas

RT/RW memiliki wewenang untuk menjaga keamanan lingkungan sekitarnya dan menjalankan hak, tugas serta fungsinya sebagai lembaga pemerintahan agar lingkungan secara keamanan dan kesejahteraan dapat tercapai.

## 5. Visi dan Misi Pemerintah Desa Pematang Manggis

### 1) Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan dimasa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa pematang manggis ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa pematang manggis seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satu satuan kerja wilayah pemangunan di kecamatan, maka Visi desa pematang manggis adalah :

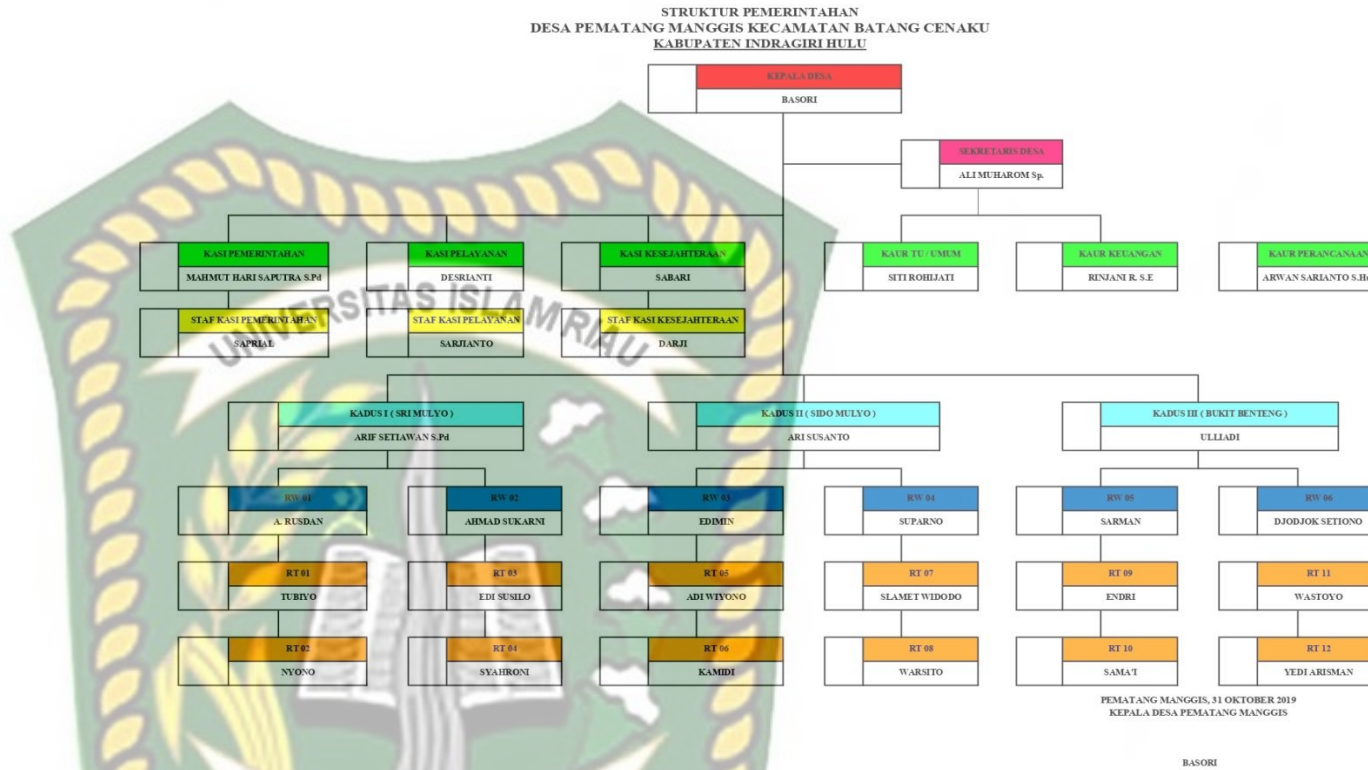
**“Mewujudkan Desa Yang Mandiri, Aman Dan Sejahtera”**

### 2) Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang meuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Adapun misi desa pematang manggis adalah :

**“Meningkatkan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia, Sehingga Menjadi Desa Yang Maju Dan Masyarakat Yang Makmur”**

Gambar II.4 Struktur Pemerintah Desa Pematang Manggis





## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Identitas Informan

Pada bab V penulis menjelaskan data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan fenomena Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan key informan yaitu Kepala Desa Pematang Manggis serta Sekretaris Desa, Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, RT/RW, dan Masyarakat penerima BLT-Dana Desa sebagai informan.

Untuk mengetahui seluruh informasi mengenai penelitian ini dapat dilihat pada keterangan dibawah ini yaitu :

#### 1. Usia Informan

Sebagi makhluk hidup tentu memiliki umur serta usia selama amsih hidup di bumi dengan berbagai kegiatan yang mereka lakukan, hal ini juga menggambarkan kematangan usia kedewasaan setiap manusia dalam menghadapi masalah serta melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu penulis membuat daftar table usia informan sebagai identitas responden dalam penelitian ini untuk Selanjutnya dapat dilihat dan dipahami. Berikut daftar usia informan :

**Table VIII.4 Usia Informan Penelitian**

No	Usia	Jumlah
1	25-40	4
2	40-60	5
	Jumlah	9

*Sumber : Hasil Olah Data Penulis Tahun 2022*

## 2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan unsur genetic yang terdapat pada manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Penulis membuat identitas informan berdasarkan jenis kelamin yang disusun melalui table sebagai berikut:

**Table IX.4 Jenis Kelamin Penelitian**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	6
2	Perempuan	3
	Jumlah	9

*Sumber : Hasil Olah Data Penulis Tahun 2022*

## 3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan sehingga seseorang dapat memiliki dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Pendidikan dapat dilakukan dengan bersekolah dari mulai tingkat SD-Universitas yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan suatu gelar agar dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Dalam hal ini penulis dapat memberikan beberapa tingkatan pendidikan berdasarkan identitas responden yang penulis teliti dalam bentuk table sebagai berikut:

**Table X.4 Tingkat Pendidikan Informan penelitian**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD	2
2	SLTP	2
3	SLTA	4
4	S1	1
	Jumlah	9

Sumber : Hasil Olah Data Penulis Tahun 2022

#### 4. Nama dan Identitas Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat penulis maka Nama serta identitas jabatan seluruh informan akan penulis paparkan dalam bentuk table dibawah ini:

**Table XI.4 Nama dan Identitas Responden**

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Pendidikan terakhir	Jabatan
1	Basori	55	Laki-Laki	SLTA	Kepala Desa Pematang Manggis
2	Ali Muharom S.P	25	Laki-Laki	S1	Sekretaris Desa Pematang Manggis
3	Sabari	45	Laki-Laki	SLTA	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
4	Suparno	47		SLTP	RW
5	Sama'i	55	Laki-Laki	SD	RT
6	Fitri Asih	34	Perempuan	SLTP	Masyarakat
7	Nina Lestari	40	Perempuan	SD	Masyarakat

8	Sarjianto	39	Laki-Laki	SLTA	Masyarakat
9	Salmawati	29	Perempuan	SLTA	Masyarakat

*Sumber : Hasil Olah Data Penulis Tahun 2022*

### **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu**

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) harus dilakukan penelitian dengan berbagai teknik. Setelah melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Maka diperoleh data responden berupa pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara dan observasi yang kemudian diperoleh hasil penelitian.

Peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengelola, serta melaksanakan program-program pembangunan guna kesejahteraan masyarakat termasuk dalam kondisi pandemic-Covid-19.

Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu merupakan organisasi atau instansi pemerintah yang ada di daerah kabupaten/kota yang harus tampil sebagai pamong masyarakat dalam bidang sosial agar dapat meningkatkan partisipatis aktif dimasyarakat khususnya di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sebagai salah satu desa terdampak covid-19.

Untuk mengetahui Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten

Indragiri Hulu diperoleh hasil penelitian dengan indicator menurut Edward III (dalam Subarsono, 2005) terdapat empat (4) indicator yang mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan implemetasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Untuk melihat Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis uraikan hasil penelitian dilapangan dengan teknik wawancara terhadap key informan dan informan penelitian.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan keberhasilan suatu kebijakan yang mengharuskan agar implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran suatu kebijakan harus tersampaikan kepada kelompok sasaran secara tepat sehingga meminimalisir adanya penyimpangan implementasi suatu program kebijakan. Pada indicator komunikasi terdapat beberapa sub indicator yang harus terpenuhi untuk keberhasilan indikator komunikasi yaitu:

#### **a. Sub indicator Sosialisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Proses Sosialisasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa pematang manggis merupakan proses pendekatan, penanaman nilai, serta didalamnya terdapat informasi yang disampaikan mengenai makna, sasaran, serta hal-hal yang

terkait dengan BLT-DD. Pada proses sosialisasi ini disampaikan oleh aparat desa yang didampingi pihak kecamatan yang ditujukan kepada KPM.

Berikut wawancara dengan Bapak Basori selaku kepala Desa Pematang Manggis mengenai pelaksanaan sosialisasi BLT-Dana Desa, Beliau mengatakan Bahwa:

*“Sebelum warga desa menerima bantuan BLT ada Sosialisasi atau informasi jelas mengenai program Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang dilakukan oleh pemerintah desa yang di dampingi oleh petugas kecamatan dikantor Desa Pematang Manggis” (Senin, 03 januari 2022)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Basori beliau mengatakan sebelum dana BLT-DD bisa disalurkan terdapat proses sosialisasi yang berisi pengantar, makna dan penyampaian informasi-informasi penting terkait BLT-DD seperti syarat-syarat untuk mendapatkan BLT-DD serta tujuan adanya program BLT-DD. Sosialisasi ini dilakukan pada tahun 2020 di kantor Desa pematang manggis. Sosialisasi dilakukan oleh pihak Desa dengan di damping pihak kecamatan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sabari selaku kepala seksi kesejahteraan masyarakat Desa Pematang Manggis tentang pelaksanaan sosialisasi BLT-DD yaitu:

*“sosialisasi dilakukan di kantor Desa yang disampaikan oleh pemerintah Desa khususnya Bapak kepala Desa dan saya didampingi pihak kecamatan, kami menyampaikan kepada masyarakat mengenai makna dan kegunaan BLT-DD serta syarat untuk mendapatkan BLT-DD ini” (Rabu, 05 Januari 2022)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sabari beliau mengatakan bahwa sosialisasi merupakan proses penyampaian makna dan kegunaan BLT-DD, selain itu didalam sosialisasi juga disampaikan oleh pihak Desa terkhusus Bapak Kepala

Desa yang didampingi oleh pihak kecamatan beliau menyampaikan syarat dan kriteria mendapatkan dana BLT-DD. Sosialisasi ini dilakukan di kantor Desa Pematang Manggis.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Nina Lestari selaku masyarakat penerima BLT-Dana Desa, beliau mengatakan bahwa:

*“ada sosialisasi dari pihak desa dan isi dari sosialisasinya ya ngasih tau ke masyarakat bahwa kami ini mendapat bantuan sosial dari pemerintah yaitu BLT-DD dan uangnya ini harus kami pakai untuk memenuhi kebutuhan pokok kebutuhan sehari-hari” (Senin, 03 januari 2022)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Basori mengenai komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan didampingi pemerintah kecamatan yaitu dalam pelaksanaan sosialisasi BLT-DD sudah berjalan cukup baik informasi sosialisasi yang disampaikan mengenai program BLT-DD sudah jelas dan konsisten sehingga dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat yang mengikuti sosialisasi namun berbeda dengan masyarakat yang tidak dapat hadir dan tidak memiliki sosial mereka memiliki persepsi atau pemahaman yang berbeda. Selanjutnya menurut Bapak Sabari Sosialisasi yang disampaikan berisi makna, tujuan dan manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) disampaikan kepada masyarakat penerima bantuan. Selain itu pemerintah juga menekankan kepada masyarakat untuk menggunakan uang BLT-DD dengan sebaik mungkin terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Sedangkan menurut masyarakat penerima BLT-DD yaitu Ibu Nina Lestari beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah Desa cukup dipahami dengan baik. Dari wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pada indikator komunikasi pada proses sosialisasi sudah dilaksanakan

cukup jelas, baik, konsisten. Isinya pun cukup dimengerti dan dipahami oleh masyarakat penerima BLT-DD, Meskipun masih terdapat masyarakat yang memiliki persepsi yang berbeda dikarenakan ketidakhadiran pada saat sosialisasi mengenai Program Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa.

**b. Sub indikator penyampaian informasi pencairan dana BLT-DD**

Pada sub indikator ini penulis ingin mengetahui bagaimana proses serta apakah penyampaian informasi terkait BLT-DD tersampaikan dengan efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Basori selaku Kepala Desa Pematang Manggis terkait penyampaian informasi pencairan dana BLT-DD. Beliau mengatakan:

*“ informasi pencairan dana BLT-DD disampaikan melalui RT/RW untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat, pola penyampaiannya kami serahkan kepada RT/RW. RT/RW harus memastikan bahwa masyarakat penerima bantuan harus dapat hadir pada saat dana sudah bisa diambil” (Senin 03, Januari 2022)*

Selain proses sosialisasi pada indikator komunikasi juga terdapat penyampaian informasi pencairan dana BLT-DD yang dikatakan oleh Bapak Basori beliau mengatakan bahwa informasi dana BLT-DD sudah dapat diambil atau dicairkan oleh masyarakat penerima bantuan disampaikan melalui RT/RW. Pola penyampaiannya diserahkan kepada RT/RW dan memastikan kehadiran masyarakat dalam pengambilan dana BLT-DD.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sabari selaku kepala seksi kesejahteraan masyarakat terkait pemberian informasi pencairan Dana BLT-DD. Beliau mengatakan:

*“pemberitahuan informasi mengenai pencairan Dana BLT-DD atau informasi apapun terkait BLT-DD kepada masyarakat hanya dilakukan*



*melalui RT/RW yang kemudian disampaikan kepada masyarakat penerima bantuan”(Senin, 03 Januari 2022)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak sabari beliau mengatakan bahwa informasi apapun terkait BLT-DD seperti informasi pencairan dana BLT-DD maupun informasi lainnya disampaikan oleh RT/RW kepada masyarakat penerima bantuan. RT/RW memiliki peran cukup penting dalam keberhasilan indicator komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Suparno selaku RW di Desa Pematang manggis terkait indicator penyampaian informasi BLT-DD. Beliau mengatakan :

*“saya diberi perintah oleh aparat Desa untuk menyampaikan informasi terkait BLT-DD, seperti informasi bahwa dana sudah dapat dicairkan dan informasi-informasi lainnya”(Sabtu, 08 Januari 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aparat Desa dan masyarakat penerima bantuan terkait informasi BLT-DD Pada indicator komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat dilakukan melalui RT/RW. Informasi mengenai pencairan dana BLT-DD maupun informasi lainnya disampaikan oleh RT/RW dimana pola penyampaiannya boleh langsung kepada masyarakat penerima bantuan atau hanya melalui whatsapp. Tugas pemerintah Desa bersama dengan RT/RW adalah memastikan masyarakat mengetahui segala informasi terkait BLT-DD. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat penulis simpulkan bahwa penyampaian informasi terlaksana cukup baik, masyarakat menerima informasi dari RW melalui media sosial. Namun bagi masyarakat yang tidak dapat hadir pada saat pengambilan dana BLT-DD dapat

diwakilkan oleh keluarga dengan syarat membawa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

## 2. Sumber Daya

Selain komunikasi yang harus dilakukan secara jelas dan konsisten, terdapat sumber daya dimana jika seorang implementor kekurangan dalam hal sumber daya maka implementasi suatu kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya yang dibutuhkan dalam suatu kebijakan seperti sumber daya manusia yang memiliki kompetensi cukup baik dan kompeten dan sumberdaya finansial. Pada indicator sumber daya terdapat beberapa sub indicator yang harus terpenuhi untuk keberhasilan indicator sumber daya. Yaitu:

### a. Sub indicator sarana dan prasarana BLT-DD

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang harus didapatkan oleh KPM pada saat sosialisasi dan penerimaan dana BLT-DD seperti kelayakan tempat, fasilitas yang baik akan memberikan citra yang baik pula bagi pemerintah Desa dimata masyarakat.

Sumber Daya juga berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana pada saat sosialisasi dan pembagian dana BLT. Dikatakan oleh Bapak Basori selaku Kepala Desa Pematang Manggis, beliau mengatakan bahwa:

*“sosialisasi dan pembagian BLT-DD dilakukan di kantor Desa Pematang manggis, kami menyediakan tempat yang layak dan nyaman untuk masyarakat” (Senin, 03 januari 2022)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Basori beliau mengatakan bahwa sosialisasi dilaksanakan di Kantor Desa Pematang Manggis dengan keadaan yang layak dan nyaman, didalam gedung Kantor Desa tersebut dilengkapi dengan kursi

dan kipas angin serta snack. Sarana dan prasarana yang layak dan nyaman ini menjadi salah satu untuk mengukur keberhasilan indikator sumber daya. Sikap dan kelayakan yang diberikan pemerintah memberikan citra Sumber Daya Manusia yang baik dimata masyarakat.

**b. Sub indikator mekanisme dan alur pendataan KPM**

Mekanisme serta alur pendataan KPM ini merupakan hal penting dalam pengimplementasian suatu program kebijakan publik agar terlaksana secara tepat sasaran.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Muharom.S.P selaku sekretaris Desa Pematang Manggis mengenai mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Beliau mengatakan bahwa:

*“proses pendataan masyarakat penerima bantuan pemerintah desa berpatokan pada data masyarakat miskin yang ada di catatan pemerintah desa untuk selanjutnya RT/RW yang melakukan survey dimasyarakat, untuk selanjutnya melalui proses validasi dan vinalisasi”*(Senin, 03 januari 2022)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali Muharom S.P beliau mengatakan bahwa masyarakat penerima BLT-DD ini merupakan masyarakat yang sudah tercatat sebagai keluarga kurang mampu atau miskin di Desa Pematang Manggis. Data masyarakat kurang mampu ini dijadikan sebagai acuan bagi RT/RW pada proses pendataan ulang sebagai upaya memastikan bahwa KPM tersebut belum mendapatkan bantuan dan layak menerima BLT-DD. Hasil survey yang dilakukan oleh RT/RW selanjutnya di validasi dan finalisasi oleh pemerintah Desa.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Nina Lestari sebagai masyarakat penerima BLT-DD mengenai proses pendataan masyarakat penerima bantuan, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk pendataannya itu saya tidak tau ya, karena saya hanya mendapatkan informasi dari pak RW katanya saya dapat bantuan BLT-DD gitu” (Senin, 03 Januari 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Basori Pada indicator Sumber Daya, Pemerintah desa sebagai instansi yang melaksanakan penyaluran BLT-DD menyediakan sarana dan prasarana yang layak pada saat kegiatan sosialisasi dan pembagian dana BLT-DD, yaitu gedung kantor Desa pematang manggis yang dilengkapi dengan kursi agar masyarakat merasa nyaman saat sosialisasi dan pembagian dana BLT-DD berlangsung. Selain itu pemerintah Desa juga memastikan bahwa masyarakat tetap mematuhi protocol kesehatan sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran covid-19.

Selanjutnya dikatakan oleh Bapak Ali Muharom S.P bahwa Selain penyediaan sarana dan prasarana sumber daya manusia juga berkaitan dengan Mekanisme pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu dengan survey oleh RT/RW dengan memegang data keluarga kurang mampu. Selanjutnya hasil survey diberikan kembali kepada pemerintah Desa untuk dilakukan proses validasi dan finalisasi. Saat data keluarga penerima bantuan sudah di finalisasi kemudian di tanda tangani kepala desa untuk selanjutnya di serahkan kepada Camat/Bupati untuk diproses penyaluran BLT-DD. Pemrosesan BLT-DD ini selambat-lambatnya lima hari setelah penyerahan data penerima bantuan oleh Desa.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Nina Lestari sebagai masyarakat penerima BLT-DD menurut beliau tidak mengetahui terkait alur pendataan masyarakat penerima bantuan, yang beliau ketahui hanya informasi yang disampaikan RW bahwa beliau mendapatkan BLT-DD.

Dari wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sarana dan prasarana yang didapatkan oleh masyarakat saat sosialisasi dan pengambilan dana BLT-DD sudah cukup nyaman dan memadai. Namun pada proses pendataan dengan melakukan survey oleh RT/RW seperti yang dikataka oleh Bapak Ali Muharom.S.P tidak sesuai dengan yang penulis lihat dilapangan. RT/RW tidak melakukan survey ulang secara mendalam, beliau hanya melihat tanpa menanyakan kembali keadaan perekonomian masyarakat serta menyeleksi masyarakat penerima bantuan apakah layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan tersebut. RT/RW hanya berpatokan dengan Data masyarakat miskin yang diberikan pihak aparat Desa.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nina Lestari bahwa proses pendaatan masyarakat penerima bantuan tidak diketahui atau tidak dilaksanakan oleh pihak pemerintah Desa. Maka dapat penulis simpulkan bahwa Pada proses pendataan dari 74 masyarakat penerima bantuan masih ada yang kurang mengerti mekanisme dan alur pendataan calon penerima bantuan, mereka juga tidak mengetahui kapan dilakukannya survey atau pendataan kembali oleh pemerintah Desa. Dikarenakan proses pendataan yang kurang transparan masyarakat banyak yang beranggapan bahwa program BLT-DD ini diberikan kepada semua masyarakat miskin.

### c. Sub indikator kompetensi petugas dalam pengawasan serta controlling BLT-DD

Dalam keberhasilan implementasi program kebijakan public diperlukan bidang khusus yang bertugas dalam mengawasi dan mengontrol program tersebut. BLT-DD di desa pematang manggis memiliki bidang dan focus pada pengawasan dan pengontrolan program-program bantuan kebijakan public yaitu seksi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Bapak Sabari sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat terkait tugas pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol program BLT-DD, beliau mengatakan bahwa:

*“pemerintah desa terutama saya sebagai penanggung jawab untuk mengontrol BLT-DD ini mempercayakan kepada RT/RW untuk melakukan pendataan atau survey kepada masyarakat setempat, selain survey saya juga mengawasi pada saat pembagian dana BLT-DD” (Rabu, 05 Januari 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sabari mengenai tugas pengawasan dan controlling program BLT DD ini Untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini, Pemerintah Desa memiliki bidang khusus yang melakukan pengawasan terhadap BLT-DD yaitu Seksi Kesejahteraan Masyarakat, bidang ini memang khusus di buat sebagai bidang yang megawasi bantuan-bantuan sosial yang ada di Desa Pematang Manggis.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Implementor

yang memiliki disposisi yang baik akan menjalankan kebijakan dengan efektif seperti yang diinginkan. Pada indicator disposisi terdapat beberapa sub indicator yang harus terpenuhi untuk keberhasilan indicator sumber daya. Yaitu:

**a. Sub indicator penyaluran dana BLT-DD**

Pada indikator ini penulis mengukur keberhasilannya dengan melihat implementasi program BLT-DD oleh pemerintah Desa dalam menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat dan kebijaksanaan masyarakat penerima bantuan dalam menggunakan bantuan dana tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Basori selaku kepala desa pematang manggis terkait ketepatsasaran dan transparansi penyaluran BLT-DD, Beliau mengatakan bahwa:

*“pemberian BLT-DD ini sesuai dengan kriteria fakir dan Peraturan Kepala Desa Pematang Manggis Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemic Covid-19, jumlahnya juga sesuai dengan yang telah ditetapkan” (Senin, 03 januari 2022)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Basori terkait ketepatsasaran pemerintah dalam menyalurkan bantuan sudah sesuai dengan ketentuan penyaluran dana yaitu sebesar Rp.600.000 per KPM selama 3 bulan dan Rp.300.000 pada bulan selanjutnya. selanjutnya beliau mengatakan masyarakat penerima bantuan sudah sesuai dengan Kriteria Fakir Miskin Dan Peraturan Kepala Desa Pematang Manggis Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemic Covid-19.

Namun pada observasi yang penulis lakukan dengan melihat data yang penulis dapatkan, jumlah nominal yang di dapatkan oleh masyarakat memang sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu berjumlah Rp.600.000 pada 3 bulan pertama dan Rp.300.000 pada bulan selanjutnya. Namun pada ketepatsasaran masyarakat penerima bantuan tidak sesuai dengan yang dikatakan serta yang diatur dalam peraturan Kepala desa seperti yang dikatakan oleh Bapak Basori, Maka dapat penulis simpulkan pada pendataan KPM masih belum tepat sasaran, hal ini dibuktikan dengan masih adanya keluarga mampu yang masih mendapatkan bantuan dikarenakan tidak adanya survey ulang secara mendalam oleh RT/RW. Selain itu masih terdapat KPM yang mendapatkan bantuan ganda, Bantuan Ganda ini diakibatkan oleh banyaknya bantuan yang ada di Desa Pematang Manggis dan kurangnya ketelitian Pemerintah Desa dalam proses validasi yang dilakukan secara manual. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah mengenai masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda tersebut.

**b. Sub indikator penggunaan BLT-DD**

BLT-DD ini harus digunakan oleh KPM secara bijaksana agar tujuan dari BLT-DD tercapai. KPM harus menggunakan dana BLT-DD ini sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dikatakan oleh masyarakat penerima bantuan dalam hal kebijaksanaan masyarakat dalam menggunakan dana bantuan, bisa dikatakan cukup baik. Berikut wawancara dengan Ibu safitri beliau mengatakan :

*"Dana BLT-DD yang diberikan oleh pemerintah saya gunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih*



*dahulu. Namun apabila kebutuhan pokok saya sudah terpenuhi dan uangnya masih sisa atau bahkan tidak terpakai ya tentu saya gunakan untuk keperluan lainnya” (Sabtu, 01 Januari 2022)*

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat penerima bantuan yaitu Ibu Safitri program BLT-DD ini sangat membantu perekonomian masyarakat miskin yang kehilangan mata pencaharian akibat dari pandemic covid-19, Maka dapat penulis simpulkan artinya tujuan dari adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat sudah cukup tercapai. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah terlebih saat pandemic seperti ini.

Meski implementasi program bantuan langsung tunai dana desa ini sudah terlaksana cukup baik masih terdapat factor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan suatu program. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Muharom.S.P beliau mengatakan bahwa:

*“program BLT-DD ini sudah terlaksana cukup baik, namun bukan berarti tidak ada hambatan. Salah satu factor penghambatnya adalah masyarakat yang tidak datang saat sosialisasi dan tidak memiliki sosial media, cenderung memiliki persepsi yang berbeda dengan masyarakat yang hadir dan update di sosial media” (Senin, 03 Januari 2022)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Muharom.S.P beliau berpendapat bahwa meskipun tujuan dari program BLT-DD ini sudah tercapai namun bukan berarti tidak ada hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Hambatan-hambatan seperti ini menjadi tugas penting dari pemerintah Desa untuk menjelaskan lebih detail mengenai makna dan tujuan dari adanya program bantuan langsung tunai-dana desa, agar tidak terjadi kesalahfahaman ditengah-tengah masyarakat yang memiliki persepsi yang berbeda.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan seseorang yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, hal ini memiliki pengaruh yang signifikan dengan implementasi suatu kebijakan. Pada indikator struktur birokrasi terdapat beberapa sub indikator yang harus terpenuhi untuk keberhasilan indikator sumber daya. Yaitu:

##### a. Sub indikator koordinasi Pemerintah Desa dengan KPM

Pada indikator struktur birokrasi penulis melihat keberhasilannya dengan melihat koordinasi pemerintah desa, RT/RW dengan masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa.

Berikut wawancara dengan Bapak Suparno selaku RW di Desa Pematang Manggis, beliau mengatakan mengenai koordinasi aparat Desa dengan Beliau yaitu:

*“Saya sebagai salah satu RW di Desa Pematang Manggis dipercaya oleh aparat Desa untuk membantu mendata dan memberikan informasi kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut, tapi saya tidak sendiri saya dibantu oleh bapak RT. Pada proses pendataan saya diberi data masyarakat kurang mampu yang ada di Desa Pematang Manggis sebagai acuan pendataan kelayakan mendapatkan BLT-DD ini. Untuk penyampaian informasi pencairan dana BLT-DD maupun informasi lainnya saya sampaikan kepada masyarakat melalui media whatsapp”*(Sabtu, 08 Januari 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suparno beliau mengatakan bahwa RT/RW memiliki peran dalam pelaksanaan program BLT-DD ini, beliau diminta oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Pematang Manggis sebagai perantara bagi pemerintah dengan masyarakat. salah satu peran RW adalah pada penyampaian segala bentuk informasi terkait BLT-DD serta pada proses

pendataan masyarakat penerima BLT-DD. Data masyarakat kurang mampu ini sebagai acuan RT/RW pada proses pendataan. Pada proses survey dan pendataan ini tentunya RW tidak bergerak sendiri, beliau dibantu oleh RT.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sama'i selaku RT di desa pematang manggis, beliau mengatakan bahwa:

*“saya mendapatkan perintah dari bapak RW untuk membantu bapak RW melakukan survey masyarakat miskin, Setelah itu catatannya saya serahkan kepada bapak RW untuk diberikan kepada pihak Desa yang akan memvalidasi datanya” (Senin, 03 januari 2022)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suparno selaku RW dan bapak Sama'I selaku RT beliau mengatakan bahwa beliau diminta oleh aparat Desa untuk ikut serta berpartisipasi serta membantu pendataan KPM dan menyampaikan informasi kepada masyarakat penerima bantuan, pendataan dilakukan dengan survey secara mendalam dengan berpatokan kepada data masyarakat kurang mampu yang diberikan aparat Desa.

Dari hasil wawancara dengan Bapak RT/RW tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Koordinasi antara pemerintah desa, RT/RW dengan masyarakat penerima bantuan terjalin cukup baik. Estafet Informasi yang diterima masyarakat cukup jelas, seperti informasi pencairan dana BLT yang disampaikan Seksi kesejahteraan masyarakat kepada RW untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat penerima bantuan. RW yang diamatkan oleh pemerintah desa untuk menyampaikan informasinya disampaikan melalui whatsapp.

Namun berdasarkan obeservasi dilapangan oleh penulis bahwasanya pendataan atau survey secara mendalam tidak dilakukan oleh RT/RW yang telah diberi amanah oleh aparat Desa. Selain itu keterbatasan pengetahuan masyarakat

mengenai alur pendataan masyarakat penerima bantuan masih lemah. Hal ini mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa program BLT-DD ini diperuntukkan bagi semua masyarakat miskin, padahal program BLT-DD ini dikhususkan bagi masyarakat miskin yang kehilangan mata pencaharian selama pandemic dan belum menerima bantuan apapun.

**b. Sub indicator penyediaan bidang khusus dalam mengontrol dan mengawasi program BLT-DD**

Selanjutnya pada indicator struktur birokrasi penulis melihat keberhasilannya dengan melihat pemerintah desa yang menyediakan bidang khusus untuk mengontrol BLT-DD ini. Bidang khusus yang mengontrol BLT-DD ini adalah seksi kesejahteraan masyarakat. pada Rabu, 05 Januari 2022 penulis menemui Bapak Sabari selaku kepala seksi kesejahteraan masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

*“tugas saya memang memantau jalannya bantuan sosial yang diberikan pemerintah, mulai dari mendata masyarakat miskin di desa pematang manggis, hingga mendata masyarakat-masyarakat yang layak menerima bantuan. Sudah tentu saja saya mengontrol BLT-DD ini. Jadi masyarakat ataupun RT/RW itu menanyakan bantuan-bantuan kepada saya” (Rabu, 05 Januari 2022)*

Bedasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sabari beliau mengatakan bahwa bidang seksi kesejahteraan masyarakat ini memang sengaja dibentuk untuk mengawasi dan mengontrol program-program bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu bidang ini memiliki peran penting untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Dari wawancara tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa keberadaan struktur birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam efektifitas, efisiensi, serta keberhasilan suatu program kebijakan

public seta kesejahteraan bagi masyarakat Desa. Maka indicator-indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III signifikan dengan implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang ada di Desa Pematang Manggis. Indicator ini penulis gunakan untuk melihat keberhasilan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Di Desa Pematang Manggis.

### **C. Faktor Penghambat Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa factor penghambat mplementasi program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Pematang Manggis Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Subarsono, 2005:90-92) Sebagai berikut:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan perbincangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam maupun luar untuk membuktikan keaslian informasi tersebut. Komunikasi dalam penyaluran BLT-DD dari pemerintah Desa pematang manggis kepada masyarakat berjalan cukup baik, dan aktif, dan konsisten. Pemerintah Desa dalam menyampaikan mengenai makna, dan proses penyaluran BLT-DD dengan memberikan arahan dan sosialisasi dilakukan secara tatap muka pada tahun 2020. Selanjutnya arahan dilakukan secara online dan berjenjang melalui ketua RT/RW.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Basori selaku Kepala Desa Pematang Manggis. Beliau mengatakan:

*“komunikasi yang dilaksanakan itu ada beberapa salah satu nya sosialisasi sebelum BLT dibagikan dan penyampaian informasi-informasi terkait BLT-DD kepada masyarakat melalui RT/RW. Undangan sosialisasi disampaikan bapak RW melalui sosial media bisa Whatsapp atau lainnya” (senin, 03 Januari 2022)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Basori adalah bahwa pemerintah desa dan masyarakat penerima bantuan melakukan komunikasi dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan bantuan ini sehingga masyarakat mengetahui kebijakan yang berlaku, serta syarat-syarat dalam mendapatkan bantuan dan waktu penyalurannya melalui RT/RW.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nina Lestari selaku masyarakat penerima BLT-DD. Beliau mengatakan bahwa:

*“informasi terkait BLT-DD saya dapatkan melalui RW. Informasi tersebut berupa kapan dana dapat diambil dan undangan untuk menghadiri sosialisasi tahun 2020” (senin, 03 Januari 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bahwasanya informasi disampaikan pemerintah melalui RW yang disampaikan dengan memanfaatkan media sosial seperti Whatsapp. Dari wawancara yang disampaikan oleh Bapak Basori dan Ibu Nina Lestari terlihat bahwa komunikasi atau koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat terjalin cukup baik. Namun dari penelitian lapangan bahwa dalam komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa dengan masyarakat masih terdapat factor penghambat yang mengakibatkan keberhasilan dari indicator komunikasi belum tercapai. Factor penghambat keberhasilan komunikasi dalam implementasi BLT-DD Pematang Manggis yaitu perbedaan persepsi masyarakat yang tidak hadir pada proses sosialisasi, serta karakter masyarakat yang cenderung mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Ketidakhadiran beberapa masyarakat pada proses sosialisasi dikarenakan dari masyarakat itu sendiri yang berhalangan hadir. Maka dapat penulis simpulkan bahwa koordinasi yang terjadi antara pemerintah desa dengan masyarakat terjalin cukup baik. Namun memang masih terdapat factor penghambat keberhasilannya yaitu perbedaan persepsi antara masyarakat yang hadir dan yang tidak hadir.

## 2. Sumber Daya

Desa Pematang Manggis memiliki bidang khusus untuk melaksanakan, mengawasi dan mengontrol efektivitas program BLT-DD yaitu kepala seksi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya desa dalam penyaluran BLT-DD ini memiliki tugas tersendiri dalam pendataan terhadap masyarakat Desa Pematang Manggis. Pemanfaatan sumberdaya yang langsung dari masyarakat desa menunjukkan kesiapan pemerintah desa dalam implementasi peraturan kepala Desa tentang BLT-DD.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak sabari, beliau mengatakan:

*“saya ditugaskan sebagai kepala seksi kesejahteraan masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi program bantuan sosial di Desa pematang Manggis. Saya juga bertanggung jawab pada proses pendataan dan validasi KPM, validasi dilakukan secara manual” (Rabu, 05 Januari 2022)*

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan bapak Sabari, Pemerintah Desa memilih sumberdaya manusia yang berkompeten dan mampu menegakkan kebijakan terkait BLT-DD. Sumberdaya yang kompeten adalah seseorang yang dapat mengenali seluruh kondisi masyarakat untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pendataan dan penyaluran dana tersebut. Selanjutnya sarana dan prasarana juga sudah memadai, dilihat dari pada saat sosialisasi dan

penyaluran BLT-DD sudah disediakan tempat bagi masyarakat penerima bantuan. Hal ini tentu didukung oleh aspek sumberdaya yang cukup baik.

Selanjutnya wawancara Dengan Bapak Basori selaku Kepala Desa Pematang manggis. Beliau mengatakan:

*“penyaluran dana BLT-DD tidak didampingi oleh pihak keamanan, kecamatan, maupun kabupaten. Pengawasan pada saat penyaluran dana BLT-DD hanya dilakukan oleh pemerintah Desa” (Senin, 03 Januari 2022)*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Basori bahwasanya lemahnya keamanan pada saat dana BLT-DD dibagikan atau disalurkan, menunjukkan bahwa sumberdaya dari pemerintah terlihat kurang maksimal.

Dari penelitian dilapangan terdapat factor penghambat keberhasilan indicator sumberdaya yaitu pada proses validasi yang bersifat manual mengakibatkan adanya masyarakat yang mendapat bantuan ganda. Diera modern seperti sekarang sudah banyak teknologi yang dapat digunakan baik itu website maupun media sosial. Pada Era saat ini website sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali pada proses validasi pendataan KPM bantuan sosial. Jika pemerintah Desa pematang manggis menggunakan website dalam proses validasi program BLT-DD maka akan meminimalisir terjadinya KPM penerima bantuan ganda.

Selain itu pada proses pembagian dana BLT-DD kurangnya partisipasi dari pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun pihak keamanan seperti pihak kepolisian. Sehingga pengawasan pembagian BLT-DD hanya dilakukan oleh pemerintah Desa pematang manggis.



### 3. Disposisi

Pelaksana suatu kebijakan memiliki kemauan, kehendak, dan tekad dalam melaksanakan sebuah kebijakan dengan serius agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Sikap pelaksanaannya adanya semangat, komitmen dan sikap yang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas agar dalam menerakan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Sabari selaku kepala seksi kesejahteraan masyarakat. beliau mengatakan:

*“proses validasi yang dilakukan secara manual tentunya membutuhkan kejelian untuk memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran” (Rabu, 05 Januari 2022)*

Hasil penelitian dan wawancara dilapangan menunjukkan bahwa para aparat pemerintah Desa sebagai petugas pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan serius. Namun dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pada indicator disposisi terdapat factor penghambat yaitu kurangnya ketelitian aparat Desa dalam menentukan masyarakat penerima bantuan, hal ini dibuktikan dengan masih adanya keluarga mampu yang mendapatkan BLT-DD ini.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu safitri selaku masyarakat penerima BLT-DD, Beliau mengatakan:

*“pemerintah memang menekankan untuk menggunakan dana BLT-DD sebaik mungkin terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari”*

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat penerima BLT-DD bahwa dana BLT-DD ini harus digunakan sebaik mungkin terutama pada pemenuhan kebutuhan primer. Meskipun masyarakat sudah menggunakan Dana BLT ini dengan bijak namun ketidakmampuan dan keterbatasan masyarakat penerima

dalam perekonomian dan penunjang sosial dengan begitu masyarakat menjadi pribadi yang mengandalkan. hal ini menghambat tujuan dari BLT-DD yaitu perubahan sosial ekonomi masyarakat penerima.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menunjukkan hubungan antar unit didalamnya. Hubungan ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil penelitian dan wawancara dilapangan bahwa masing-masing menjalankan sesuai dengan ketentuan. Untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas penyaluran BLT-DD ini dibuat sesuai dengan SOP dalam pemilihan petugas pelaksanaannya.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Basori selaku Kepala Desa Pematang manggis. Beliau mengatakan :

*“penyaluran BLT-DD dilaksanakan oleh pemerintah desa saja secara bergantian”(Senin, 03 Januari 2022)*

Pemerintah Desa Pematang Manggis melaksanakan penyaluran BLT-DD secara kondusif dan lancar. Namun dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan pada indikator struktur birokrasi terdapat factor penghambat keberhasilannya yaitu tidak disediakan insentif dan operasional yang tetap kepada para petugas pembagian dana BLT-DD, semuanya bersifat sukarela dalam melayani masyarakat. hanya berupa inisiatif kepala desa yang memerintahkan kepada aparat Desa Pematang manggis.

## BAB VI PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan setiap indikator dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertama, Komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa, RT/RW, maupun masyarakat penerima bantuan sudah terjalin cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan sosialisasi dengan baik meskipun masih ada masyarakat yang tidak dapat hadir pada saat sosialisasi dan pembagian dana BLT-DD dilaksanakan. Kedua, pada indikator Sumber Daya mengenai 74 masyarakat penerima bantuan yang ditetapkan belum sesuai dengan kriteria penerima BLT-Dana Desa menurut Bappenas dan kriteria fakir miskin menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Kriteria Fakir Miskin. proses pendataan pun tidak bersifat transparan sehingga masyarakat tidak mengetahui alur pendataan penerima bantuan. Ketiga, pada indikator Disposisi dilihat dari proses penyalurannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan namun pada pendataan KPM belum tepat sasaran, dibuktikan dengan adanya masyarakat yang sudah mampu namun masih mendapat bantuan dan masih ditemukan masyarakat penerima bantuan ganda. Dana BLT-DD sudah digunakan sebagaimana mestinya oleh KPM. Keempat, indikator Struktur Birokrasi sudah dilaksanakan dengan cukup baik, tertib dan disiplin dilihat dari adanya bidang khusus dari Desa untuk mengontrol dan mengawasi Implementasi Program Bantuan Langsung

Tunai-Dana Desa serta pembagian tugas selama proses pendataan dan penyaluran dana BLT-DD.

2. Dari observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan terdapat factor pendukung dan factor penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa di Desa Pematang manggis kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Factor pendukungnya adalah peran dari aparatur Desa, RT/RW dan lembaga Desa yang turut serta mengikuti dan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan factor penghambatnya adalah, minimnya Sumber Daya Manusia di tingkat Desa mengakibatkan beberapa hal, seperti alur pendataan yang belum sesuai sehingga bantuan belum tepat sasaran dan keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai alur pendataan.

#### **B. SARAN**

Dari kesimpulan yang telah penulis jabarkan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Aparatur Desa Pematang manggis agar dapat lebih teliti dalam pendataan Bantuan Sosial dan melakukan survey ulang agar bantuan dapat diberikan dengan tepat sasaran, serta diharapkan kepada Aparatur Desa untuk lebih memanfaatkan Teknologi di Era sekarang.
2. Adanya musyawarah yang dilakukan Pemerintah Desa secara terus menerus dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah terkhusus pada program Bantuan langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)

3. Perlunya sosialisasi berulang secara langsung oleh Aparatur Desa dalam memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat yang kurang faham mengenai alur pendataan dan sasaran penerima BLT-DD.
4. Perlunya pengawasan saat pembagian Dana BLT-DD oleh pihak Kabupaten, Kecamatan, maupun Kecamatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Creswell, John W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Camouran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- J.R.Raco, M. (2010). *Metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Labolo, Muhadam. (2014). Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu. (2015). *Kybernology Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD Juni 2020)
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta:Pustaka pelajar
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix methods*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*.Bandung. PT. Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana. (2013). *Ilmu Pemerintahan*.Bandung: CV Mandar Maju
- Syafiie, Inu Kencana. (2014). *Sistem Administrasi Negara*.Jakarta:; PT Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Public*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan*.Jakarta: PT. Bumi Aksara

Zulkifli, d. (2013). Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. Pekanbaru: Fisipol UIR.

**Jurnal:**

Anggara, Sahaya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Hidayat, Endik. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemic Covid-19 Di Sampang. Soetomo Comuunication And Humanities. Vol.1 No 126-136

Jannah, Nikmatul Nur. (2018). Implemenasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Di Kabupaten Pati. Ilmu Administrasi Public. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro

Karniawati, Nia. (2015). Hakekat Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 1, No 2

Larasati, Dyah Ayu et al. (2008) implementasi sistem manajemen mutu (smm) berbasis iso 9001:2008 dalam lembaga pendidikan. *Jurnal adminitrasi public*. Vol 1. No 1

M. Ahmad, Darmiah.(2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Didesa Tetaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*. Vol 4 No 2

Maun, C E.(2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Amsyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

- Novianty, Ira. et al. (2020). Desa Dimasa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat) Budgeting Practices And Distribution Of Village Funds During The Covid-19 Pandemic. Vol 1 No 1
- Pamungkas, Binar Dwiyanto et al. (2020). Penggunaan dana desa pada masa pandemic covid-19 di kabupaten Sumbawa. Indonesian journal of social sciences and humanities. Vol 1 No 2 Hal,96-108
- Rahayu,T.I., & Gufron,A.(2020). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Didesa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020. Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang, 1(21).144-166
- Ramdhani, Abdullah, et al.(2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Public. Jurnal Public. Vol 11 No 1
- Suhu, Bakri La, et al.(2021). Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 Dipulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi Tentang Implementasi Pembagian BLT-DD diDesa Mano) Vol 2 No 1
- Sutmasa, Y Gede. (2021). Memastikan Efektifitas Implementasi Kebijakan Public. Jurnal cakrawala. Vol 04. No 01
- Wibawani, Sri, et al.(2021). Evaluasi Program BLT Dana Desa Sebagai Jarring Pengaman Sosial Di Desa Kemplagi Kabupaten Mojokerto. Vol 3 No 5



**Sumber Lainnya:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang  
Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan  
Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (covid-19)

Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Kriteria Fakir Miskin

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan  
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana  
Desa Tahun 2020

Peraturan Kepala Desa Pematang Manggis Nomor 2 Tahun 2021 Tentang  
Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat  
Dampak Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)